



**BUKU REFERENSI**

# **DINAMIKA GLOBAL PEREKONOMIAN INDONESIA**

---

**Penulis :**

**Dr. Irma Suryahani, S.E., M.Si**

**Dr. Nurhayati, S.E., M.E**

**Dr. E. Ratna Setyawati Gunawan, SE., M.Si**

**SONPEDIA.COM**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

# BUKU REFERENSI DINAMIKA GLOBAL PEREKONOMIAN INDONESIA

**Penulis :**

Dr. Irma Suryahani, S.E., M.Si

Dr. Nurhayati, S.E., M.E

Dr. E. Ratna Setyawati Gunawan, SE., M.Si

**Penerbit:**

**SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

# **BUKU REFERENSI DINAMIKA GLOBAL PEREKONOMIAN INDONESIA**

**Penulis :**

Dr. Irma Suryahani, S.E., M.Si

Dr. Nurhayati, S.E., M.E

Dr. E. Ratna Setyawati Gunawan, SE., M.Si

**ISBN : 978-623-514-201-2**

**Editor :**

Efitra

**Penyunting :**

Nurrohmi Gita Pemata

**Desain sampul dan Tata Letak :**

Yayan Agusdi

**Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

**Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: [sonpediapublishing@gmail.com](mailto:sonpediapublishing@gmail.com)

Website: [www.buku.sonpedia.com](http://www.buku.sonpedia.com)

**Anggota IKAPI : 006/JBI/2023**

Cetakan Pertama, Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "***BUKU REFERENSI DINAMIKA GLOBAL PEREKONOMIAN INDONESIA***" dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, perubahan geopolitik, serta pergeseran pusat-pusat ekonomi dunia. Fenomena seperti globalisasi, krisis ekonomi, perubahan iklim, serta pandemi global telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor perekonomian. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar tidak terlepas dari dampak perubahan tersebut.

Buku ini merupakan salah satu buku referensi yang membahas dan mengeksplorasi perjalanan ekonomi Indonesia di tengah perubahan dunia. Buku ini dimulai dengan menguraikan latar belakang perekonomian global serta sejarah perkembangan ekonomi Indonesia, dari masa kolonial hingga era modern. Penjelasan tentang hubungan Indonesia dengan perekonomian internasional menunjukkan peran strategis negara ini dalam perdagangan global dan kerja sama ekonomi.

Selanjutnya, buku ini memaparkan struktur ekonomi Indonesia yang mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier, serta perubahan kebijakan ekonomi dari waktu ke waktu. Pembahasan mendalam tentang sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, jasa, dan pariwisata memberikan gambaran jelas mengenai kontribusi masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknologi dan inovasi juga

dibahas sebagai pendorong utama transformasi ekonomi. Dengan analisis yang mendalam, buku ini menawarkan wawasan komprehensif mengenai tantangan dan peluang ekonomi Indonesia, menjadikannya referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang ingin memahami dinamika ekonomi Indonesia di kancah global.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Porwokerto, September 2024

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
A. MEKANISME PEREKONOMIAN GLOBAL .....	1
B. PERJALANAN RODA EKONOMI INDONESIA .....	12
C. RELASI EKONOMI INDONESIA DAN GLOBAL.....	19
<b>BAB 2 STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA .....</b>	<b>24</b>
A. SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA .....	27
B. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA (SEKTOR PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER) .....	49
C. KEBIJAKAN EKONOMI DARI MASA KE MASA .....	61
<b>BAB 3 SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI INDONESIA .....</b>	<b>84</b>
A. SEKTOR PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	84
B. SEKTOR INDUSTRI DAN MANUFAKTUR .....	89
C. SEKTOR JASA DAN PARIWISATA .....	92
D. TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEREKONOMIAN .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>104</b>

# BAB 1

## PENGANTAR

### A. MEKANISME PEREKONOMIAN GLOBAL

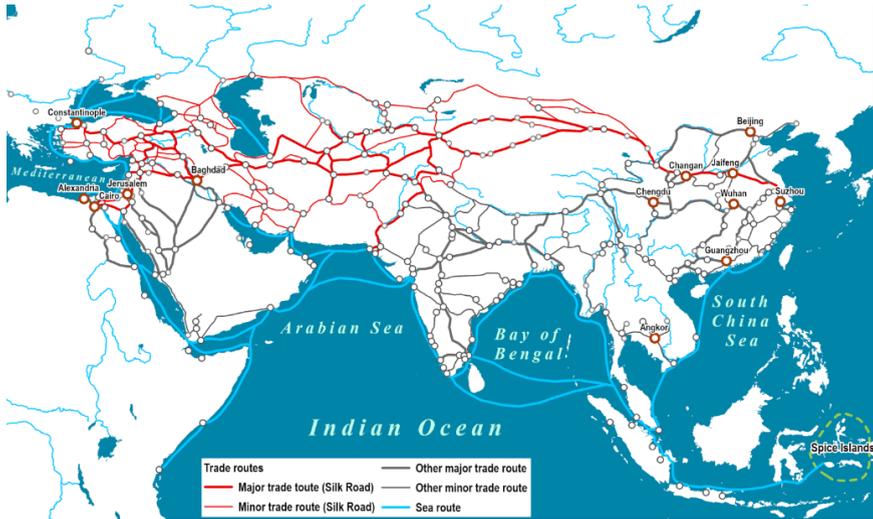
Latar belakang perekonomian global dapat dibagi menjadi beberapa periode utama dalam sejarah dunia, masing-masing dipengaruhi oleh perubahan geopolitik, teknologi, dan kebijakan ekonomi. Terdapat berbagai mekanisme perekonomian yang dilakukan mulai dari pertukaran barang hingga penggunaan mata uang modern sebagai bagian dari sejarah ekonomi dunia.

#### **Ekonomi Tradisional dan Fase Kolonialisme**

Disebut sebagai era keterbukaan awal dan dimulainya globalisasi, pada masa sebelum *First Industrial Revolution*, ekonomi dunia didominasi oleh sistem barter dan ekonomi agraris yang telah dimulai sejak zaman kuno. Ekonomi sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian, berburu, peternakan, dan perdagangan lokal.

Seiring dengan waktu, sistem perdagangan mulai berkembang melalui Jalur *Sutera* (絲綢之路), yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Jalur ini memainkan peran penting dalam pertukaran barang seperti sutra, rempah-rempah, dan teknologi. Jalur Sutera telah beroperasi sejak abad ke 2 SM yang menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia kuno, membantu memperluas jaringan perdagangan dan memperkenalkan berbagai produk dan ideologi ke berbagai wilayah di dunia. Sehingga, Jalur Sutera tidak

hanya memperkaya ekonomi lokal tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya di seluruh dunia.



*Gambar 1.1. Peta Jalur Sutera Dunia*

Pada abad ke-15, ekspansi kolonial oleh negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Inggris, dan Belanda menciptakan jaringan perdagangan global yang lebih terstruktur. Perdagangan internasional meningkat dengan adanya pengiriman bahan mentah dari koloni-koloni di Amerika, Afrika, dan Asia ke Eropa, yang kemudian diproses menjadi produk jadi. Ekspansi ini tidak hanya melibatkan pengambilan sumber daya alam, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang saling terhubung antara berbagai belahan dunia.

Negara-negara Eropa yang terlibat dalam kolonialisasi memanfaatkan kekayaan alam dari wilayah jajahan mereka untuk mendukung pertumbuhan industri di dalam negeri. Seperti contoh yaitu, Inggris

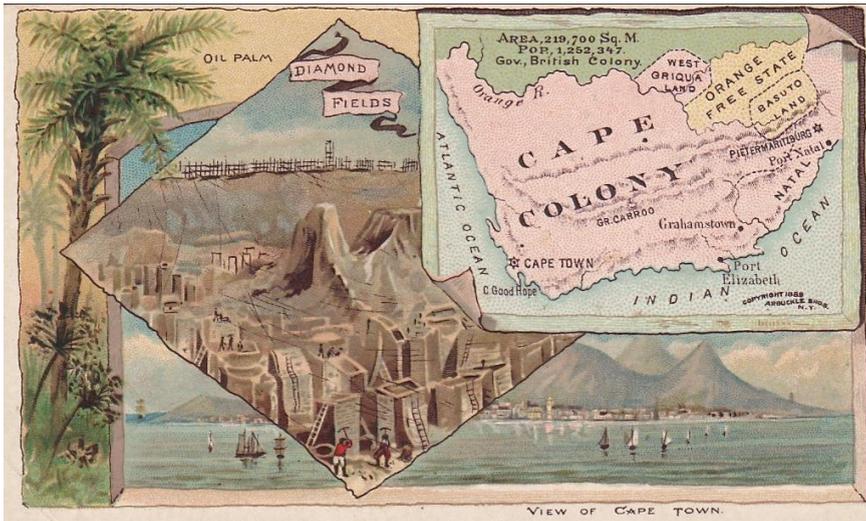
mengimpor kapas dari India untuk diolah menjadi tekstil, sementara Belanda mengeksploitasi rempah-rempah dari Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar Eropa yang terus meningkat.

Jaringan perdagangan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi dalam transportasi dan navigasi. Penemuan teknologi perkapalan yang lebih efisien dan penggunaan mesin uap mempercepat perjalanan antar benua, memungkinkan pengiriman barang dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan volume perdagangan dan memperkuat posisi negara-negara Eropa sebagai kekuatan ekonomi global.

Interaksi antara budaya dan ekonomi di sepanjang jalur perdagangan ini menghasilkan pertukaran ide dan teknologi yang signifikan. Contoh yang berdampak yaitu teknik pertanian baru diperkenalkan ke berbagai wilayah melalui kontak perdagangan, meningkatkan produktivitas pertanian di koloni Eropa tersebut. Namun, ekspansi kolonial ini juga memiliki dampak negatif yang besar bagi masyarakat lokal. Eksploitasi sumber daya alam sering kali disertai dengan penindasan terhadap penduduk asli, yang kehilangan tanah dan hak atas sumber daya mereka.

Oleh karena itu, meskipun periode ini menandai awal dari sistem ekonomi global yang saling terhubung, ia juga menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi, sehingga secara keseluruhan menyimpulkan bahwa abad ke-15 merupakan titik balik penting dalam sejarah perekonomian global, di mana kolonialisme dan

perdagangan internasional mulai membentuk pola interaksi ekonomi yang kompleks antara negara-negara Eropa dan koloni-koloni mereka.

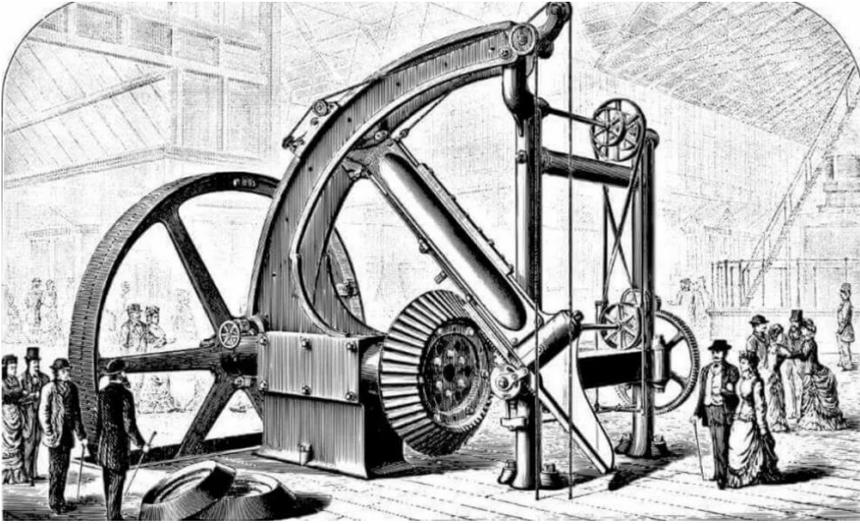


*Gambar 1.2. Ilustrasi Kolonialisme Global*

### **Fase Revolusi Industri Abad 18 & 19**

Revolusi Industri yang dimulai pada abad ke-18 mengubah ekonomi dunia secara drastis. Dengan adanya inovasi teknologi, seperti mesin uap, industri tekstil, dan peningkatan produksi baja, ekonomi beralih dari berbasis agraris menjadi ekonomi industri.

Inggris menjadi pusat dari revolusi ini, diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya dan Amerika Serikat. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara produksi barang, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan pola hidup masyarakat. Munculnya mesin menggantikan sistem kerajinan tangan yang lebih tradisional, meningkatkan efisiensi dan skala produksi.



*Gambar 1.3. Penggunaan Mesin Teknologi Industri*

Tenaga kerja yang sebelumnya terlibat dalam pertanian kini beralih ke sektor industri, menciptakan urbanisasi besar-besaran saat orang-orang berpindah ke kota-kota untuk mencari pekerjaan. Perubahan besar lainnya adalah munculnya kapitalisme industri dan sistem perbankan modern.

Kapitalisme industri menandai pergeseran dari ekonomi feodal menuju sistem di mana modal dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Perbankan mulai berkembang dengan menawarkan pinjaman kepada pengusaha untuk mendanai proyek-proyek industri, yang pada gilirannya memperkuat pertumbuhan sektor-sektor baru.

Perdagangan internasional semakin berkembang, dengan imperialisme ekonomi yang dilakukan oleh kekuatan kolonial Eropa

terhadap Asia dan Afrika. Negara-negara Eropa berusaha mengamankan sumber daya alam yang melimpah dan pasar baru untuk produk-produk mereka.

Sehingga menciptakan jaringan perdagangan global yang kompleks, di mana barang-barang seperti kapas, gula, dan rempah-rempah diperdagangkan secara luas. Selain itu, Revolusi Industri juga membawa dampak sosial yang signifikan.



*Gambar 1.4. Vladimir Lenin, Tokoh Revolusi Ekonomi dan Sosial*

Munculnya kelas pekerja dan borjuasi baru menimbulkan tantangan sosial, termasuk kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik serta perjuangan untuk hak-hak pekerja. Gerakan sosial mulai muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami oleh kelas pekerja.

Secara keseluruhan, Revolusi Industri tidak hanya merevolusi cara barang diproduksi tetapi juga membentuk kembali perekonomian global, menciptakan dinamika baru dalam hubungan sosial dan ekonomi yang terus berlanjut hingga hari ini.

### **Depresi Besar dan Pasca Perang Dunia I**

Perang Dunia I (1914-1918) menghancurkan banyak ekonomi di seluruh dunia terutama Eropa. Negara-negara yang terlibat dalam perang mengalokasikan sumber daya besar untuk keperluan militer, sehingga menyebabkan inflasi dan kekurangan barang.

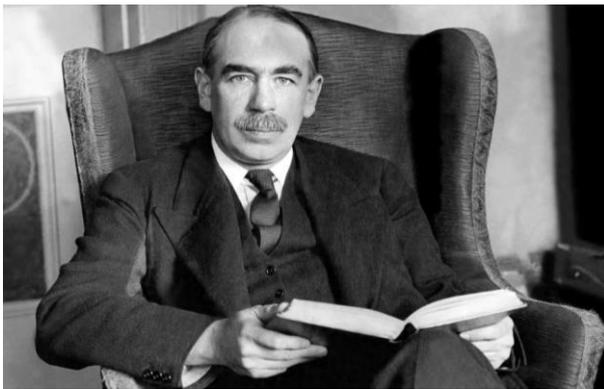


*Gambar 1.5. Raja dan Kaisar Eropa sebagai Simbol Perang Dunia 1*

Setelah perang berakhir, negara-negara harus menghadapi tugas besar untuk memulihkan ekonomi mereka. Pada tahun 1920-an, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang dikenal sebagai "Roaring Twenties." Namun, ini juga diiringi dengan gelembung spekulatif di pasar saham, yang berujung pada krisis keuangan besar pada tahun 1929.

*The Great Depression* atau Depresi Besar adalah salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Peristiwa ini dimulai dengan jatuhnya bursa saham New York pada tanggal 24 Oktober 1929, yang dikenal sebagai *Black Thursday*. Dalam beberapa hari berikutnya, harga saham jatuh drastis, menyebabkan keruntuhan pasar saham dan kebangkrutan bank.

Depresi Besar berdampak luas di seluruh dunia. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan juga menurun. Kota-kota besar terpukul, terutama kota yang pendapatannya bergantung pada industri berat. Kegiatan pembangunan gedung terhenti, dan wilayah pedesaan yang hidup dari hasil pertanian juga terkena dampak karena harga produk pertanian turun 40 hingga 60 persen.



*Gambar 1.6. John Maynard Keynes, Pencetus Ekonomi Keynesian*

Untuk menanggulangi Depresi Besar, banyak negara beralih dari sistem ekonomi pasar bebas ke intervensi pemerintah melalui program sosial dan ekonomi. Pemerintah Amerika Serikat, misalnya,

menerapkan kebijakan Keynesian yang dipimpin oleh John Maynard Keynes. Kebijakan ini berfokus pada intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

### **Perang Dunia 2 dan Pasca Perang**

Perang Dunia II (1939-1945) membawa dampak besar pada ekonomi dunia. Untuk memulihkan ekonomi global yang porak-poranda, *Bretton Woods Conference* diadakan pada tahun 1944, yang melahirkan lembaga-lembaga penting seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk mengatur ekonomi global dan memberikan bantuan keuangan kepada negara yang membutuhkan.



*Gambar 1.7. Konferensi Bretton Woods*

*Bretton Woods Conference*, yang berlangsung dari 1 hingga 22 Juli 1944, dihadiri oleh delegasi dari 44 negara. Konferensi ini diadakan di Mount Washington Hotel, New Hampshire, dengan tujuan untuk

menciptakan sistem moneter internasional yang stabil pasca-Perang Dunia II. Para delegasi menyadari bahwa untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi seperti Depresi Besar dan untuk mendukung pemulihan pascaperang, diperlukan kerjasama internasional yang lebih baik dalam hal kebijakan ekonomi dan moneter.

Dua lembaga utama yang lahir dari konferensi ini adalah IMF (*International Monetary Funds*) dan Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction and Development - IBRD*).

**IMF** dibentuk untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mengalami defisit neraca pembayaran. IMF berfungsi sebagai forum konsultasi bagi negaraanggota untuk membahas masalah ekonomi dan moneter.

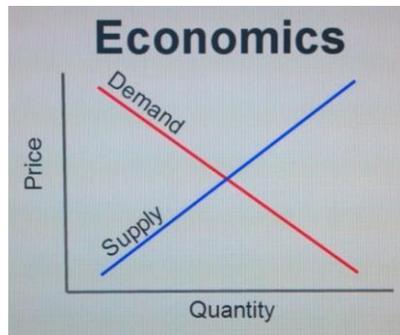
**Bank Dunia** ditugaskan untuk memberikan pembiayaan bagi rekonstruksi negara-negara yang hancur akibat perang dan untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara berkembang.

### **Globalisasi Ekonomi (1970-sekarang)**

Globalisasi ekonomi mulai meningkat sejak 1970-an, didorong oleh liberalisasi perdagangan, inovasi teknologi, dan integrasi pasar global. Proses ini ditandai dengan penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan peningkatan kerjasama internasional. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995, yang bertujuan untuk mengawasi aturan perdagangan internasional dan

memastikan bahwa perdagangan antar negara dapat berlangsung secara adil dan efisien.

Liberalisasi perdagangan menjadi salah satu pendorong utama globalisasi ekonomi. Negara-negara di seluruh dunia mulai mengurangi tarif dan menghapus kuota impor, yang memungkinkan barang dan jasa bergerak lebih bebas di antara negara-negara. Ini menciptakan pasar yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi dan berkompetisi, serta meningkatkan akses konsumen terhadap produk dari seluruh dunia.



*Gambar 1.8. Kurva Permintaan dan Penawaran*

Inovasi teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi, memainkan peran besar dalam mengubah cara bisnis dilakukan. Internet telah merevolusi cara perusahaan beroperasi, memungkinkan e-commerce untuk berkembang pesat. Perdagangan elektronik memungkinkan konsumen untuk membeli barang secara online dari berbagai belahan dunia, sementara perusahaan dapat menjangkau pasar global tanpa batasan geografis. Ekonomi berbasis data juga muncul sebagai bagian penting dari perekonomian global

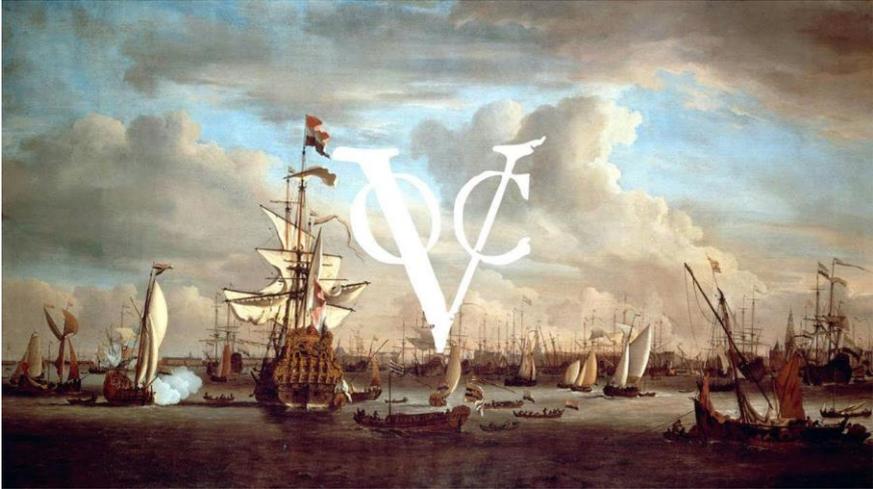
modern, di mana informasi menjadi aset berharga yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan.

Selain itu, munculnya ekonomi pasar berkembang seperti China dan India telah menjadi kekuatan baru dalam perekonomian dunia. Dengan populasi besar dan potensi pasar yang luas, kedua negara ini telah menarik investasi asing yang signifikan dan menjadi pusat produksi global. China, khususnya, telah menjadi "pabrik dunia," memproduksi barang dalam skala besar dengan biaya rendah, sehingga mengubah pola perdagangan global.

## **B. PERJALANAN RODA EKONOMI INDONESIA**

### **Era Kolonial (Abad 16-Abad 19)**

Pada masa kolonial, perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan negara penjajah, terutama Belanda. *VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* mendominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia pada abad ke-17, mengontrol banyak wilayah di Nusantara.



*Gambar 1.9. Vereenigde oost-Indische Compagnie*

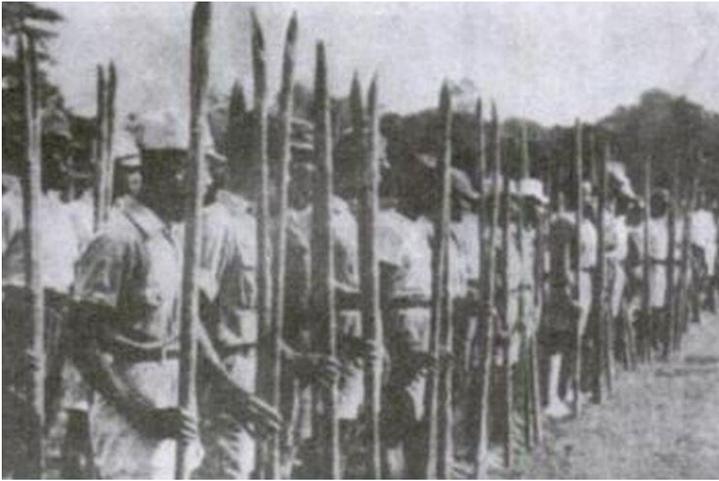
Setelah kebangkrutan VOC, pemerintah Belanda mengambil alih dan menerapkan **sistem tanam paksa** (*cultuurstelsel*) pada 1830, yang mewajibkan petani Indonesia menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk diekspor ke Belanda.

Eksplorasi ekonomi ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi penduduk pribumi. Namun, pada akhir abad ke-19, sistem ini digantikan oleh **sistem ekonomi liberal**, yang memberi kebebasan kepada pengusaha swasta, terutama dari Eropa, untuk membuka lahan-lahan perkebunan di Indonesia.

### **Era Pendudukan Jepang (1942-1945)**

Masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan periode yang signifikan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Selama periode ini, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat berbeda dari

pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya, dengan fokus utama pada kepentingan perang.



*Gambar 1.10. Era Kedatangan Jepang ke Indonesia*

Jepang menerapkan sistem ekonomi perang di Indonesia, yang berarti bahwa semua sumber daya ekonomi diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Kebijakan ini melibatkan penyitaan pabrik, perkebunan, bank, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda. Semua hasil produksi dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang, sehingga mengabaikan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara intensif. Mereka menguasai lahan pertanian dan mengalihkan fokus produksi dari tanaman pangan ke komoditas yang lebih dibutuhkan untuk perang, seperti beras dan bahan mentah lainnya. Hal ini menyebabkan

banyak lahan pertanian terabaikan dan produksi pangan menurun drastis, yang berujung pada kelaparan di berbagai daerah.

Dalam rangka mendukung kebutuhan perang, Jepang memberlakukan kebijakan penyerahan hasil pertanian yang ketat. Petani diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah Jepang, seringkali dengan harga yang ditetapkan sangat rendah. Kebijakan ini menyebabkan banyak petani mengalami kerugian dan kesulitan ekonomi, serta meningkatnya kemiskinan di kalangan masyarakat.

Kondisi perekonomian semakin memburuk akibat inflasi parah yang terjadi selama masa pendudukan Jepang. Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang tidak memiliki jaminan, sehingga nilai mata uang menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari melonjak tinggi, sementara daya beli masyarakat menurun drastis.

Dampak dari kebijakan ekonomi Jepang tidak hanya dirasakan dalam sektor ekonomi tetapi juga dalam aspek sosial. Banyak orang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik dan pengalihan sumber daya ke industri perang. Kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi semakin sulit, dengan meningkatnya angka kelaparan dan penyakit akibat kurangnya gizi.

### **Pasca Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1966)**

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi. Pemerintah awal di

bawah Presiden Soekarno berfokus pada **nasionalisme ekonomi**, yang menekankan kemandirian dari pengaruh asing. Pada periode ini, banyak asset asing, termasuk perusahaan Belanda, dinasionalisasi.



*Gambar 1.11. Kebijakan Gunting Syafruddin sebagai Solusi Inflasi*

Namun, kebijakan ekonomi pada masa **Orde Lama** sangat dipengaruhi oleh politik. Dengan adanya **Demokrasi Terpimpin** (1959-1965), ekonomi Indonesia mengalami stagnasi. Soekarno memprioritaskan proyek-proyek besar seperti pembangunan monumen dan infrastruktur simbolis, sementara inflasi melonjak hingga mencapai 600% pada tahun 1965. Akibatnya, perekonomian Indonesia mengalami krisis hebat.

### **Orde Baru (1966-1998)**

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki fase baru yang dikenal sebagai **Orde Baru**, dengan fokus utama pada **stabilitas ekonomi** dan **pertumbuhan yang cepat**. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti **IMF** dan **Bank Dunia** untuk mendapatkan bantuan finansial serta menerapkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing.



*Gambar 1.12. Era Orde Baru*

Program ini berhasil menstabilkan inflasi, meningkatkan investasi asing, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pada dekade 1980-an, Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan berkat **booming minyak**, yang kemudian diikuti oleh diversifikasi ekonomi ke sektor non-minyak seperti manufaktur dan pertanian. Namun, meskipun ekonomi berkembang pesat, ketimpangan ekonomi dan korupsi yang meluas menandai periode ini.

### **Krisis Finansial Asia (1997-1998)**

Krisis finansial Asia pada 1997 menghantam ekonomi Indonesia dengan keras. Rupiah terdepresiasi secara drastis, perbankan kolaps, dan ekonomi mengalami kontraksi besar-besaran. Krisis ini juga memicu kerusuhan sosial dan akhirnya menyebabkan jatuhnya presiden Soeharto pada 1998 setelah 32 tahun berkuasa.



*Gambar 1.13. Berakhirnya Era Orde Baru*

### **Reformasi (1998-Sekarang)**

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era **Reformasi** dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan demokratisasi. Pemerintah melakukan berbagai reformasi, termasuk restrukturisasi perbankan dan kebijakan desentralisasi untuk memberikan wewenang ekonomi lebih besar kepada daerah.



*Gambar 1.14. Era Reformasi dan Masa Kini*

Pada awal abad ke-21, ekonomi Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan yang stabil, ditopang oleh sektor-sektor seperti komoditas, manufaktur, dan jasa. Indonesia juga menjadi anggota **G20**, yang menandai pengakuan internasional terhadap pertumbuhan ekonominya. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa **ketimpangan sosial**, **pengangguran**, serta **korupsi** yang masih perlu ditangani.

Pada awal abad ke-21, ekonomi Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan yang stabil, ditopang oleh sektor-sektor seperti komoditas, manufaktur, dan jasa. Indonesia juga menjadi anggota **G20**, yang menandai pengakuan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa **ketimpangan sosial**, **pengangguran**, serta **korupsi** yang masih perlu ditangani.

### **C. RELASI EKONOMI INDONESIA DAN GLOBAL**

Relasi perekonomian Indonesia dengan ekonomi global dinilai sangat signifikan melalui perdagangan, investasi, partisipasi dalam organisasi internasional, serta integrasi digital. Sebagai bagian dari perekonomian global, Indonesia terus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sambil menghadapi tantangan dalam hal ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan daya saing global.

## **Perdagangan Internasional**

Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam perdagangan global, terutama melalui ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, karet, dan gas alam. Negara ini memiliki pasar ekspor utama di kawasan seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa.

Dalam hal ini, Indonesia berperan sebagai pemasok bahan mentah dan produk setengah jadi yang penting bagi perekonomian global.

Perdagangan internasional ini juga memainkan peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia. Misalnya, ***ASEAN Free Trade Area (AFTA)*** dan perjanjian bilateral lainnya telah memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan negara tetangga di Asia Tenggara, sehingga memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.



*Gambar 1.15. Peta Negara ASEAN*

### **Foreign Direct Investment**

Investasi asing atau **FDI** memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan terbukanya sektor seperti manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur bagi investor asing.

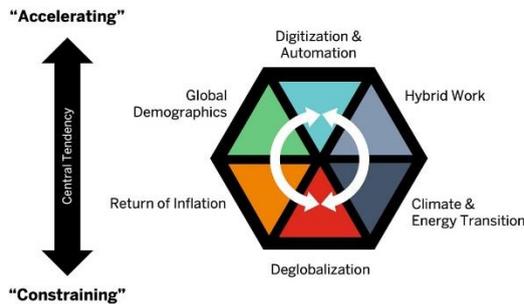
Aliran FDI telah membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang berkontribusi besar dalam investasi asing di Indonesia.

FDI tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi dan keahlian manajerial yang penting untuk mendukung industrialisasi dan pembangunan infrastruktur Indonesia. Di sisi lain, investor asing

diuntungkan oleh populasi besar dan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

### Partisipasi dalam Ekonomi Digital dan Organisasi Global

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Indonesia mulai terintegrasi lebih dalam dengan ekonomi global melalui sektor **e-commerce** dan **ekonomi digital**. Transformasi digital juga mempercepat partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, baik di bidang manufaktur maupun jasa.



*Gambar 1.16. Ekonomi Disrupsi*

Sektor digital juga mendukung pertumbuhan **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)** di Indonesia, yang memiliki akses lebih luas ke pasar global melalui platform digital. Globalisasi ekonomi digital memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan daya saing.

### Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan fokus pada ekonomi hijau dan **pembangunan berkelanjutan**, dengan Indonesia

berkomitmen pada target **penurunan emisi karbon** sebagai bagian dari **Perjanjian Paris**.

Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alamnya agar lebih berkelanjutan, serta berpartisipasi dalam inisiatif global yang terkait dengan lingkungan hidup, seperti **Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)**.



*Gambar 1.17. Konsep Ekonomi Hijau*

## BAB 2

# STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan terluas dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dengan letak geografis yang unik, Indonesia memiliki keistimewaan yang dapat menjadi kekuatan dalam pemanfaatannya. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui posisi besar yang strategis ini salah satunya adalah keuntungan ekonomi. Posisi yang terletak pada jalur perdagangan internasional sangat menguntungkan dalam mendukung Indonesia mencapai akses ke pasar global. Kemungkinan untuk bergabung dalam kancah perdagangan internasional dengan mudah akan menjadi peluang dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Keuntungan tersebut juga Kekayaan sumber daya alam pada wilayah perairan dan daratan yang tersebar di berbagai pulau memberikan potensi besar bagi berbagai sektor. Berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, dan industri maritim menjadi sangat spesial dengan posisi strategis Indonesia. Keanekaragaman budaya dan sumber daya alam di setiap pulau turut membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal yang unik. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia telah mengalami sejarah ekonomi yang panjang dan kompleks. Berbagai perubahan dan masa transisi yang beragam. Sejak masa kolonial, ekonomi Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Hal-hal seperti dinamika politik, kebijakan pemerintah,

serta perubahan global menjadi pengaruh-pengaruh yang signifikan pada perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam perjalanan panjang tersebut, Indonesia telah melalui berbagai fase perkembangan ekonomi. Dimulai dengan fokus pada ekonomi agraris yang memanfaatkan sumber daya alam, hingga melalui perkembangan hingga mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan.

Tidak terlupakan pula, saat ini perkembangan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan teknologi. Digitalisasi dan inovasi teknologi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada era modernisasi seperti saat ini. Sektor-sektor baru seperti teknologi informasi, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital mulai dikembangkan dan dijadikan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Masa revolusi industri 4.0 kerap memberikan peluang besar bagi Negara Indonesia untuk mengintegrasikan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat dilihat dari mulainya dikembangkan pertanian berbasis teknologi, hingga kegiatan manufaktur dan jasa yang semakin efisien dengan bantuan teknologi. Pengembangan teknologi pada berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan turut meningkatkan daya saing Indonesia pada tingkat global.

Namun, tidak sedikit pula tantangan yang dihadapi Indonesia dalam perkembangan ekonominya. Salah satu tantangan utama bagi perekonomian Indonesia adalah ketimpangan pembangunan

antarwilayah. Daerah-daerah yang berada dekat dengan kawasan perekonomian pusat dan kota-kota besar memiliki akses dan peluang yang lebih besar, dibandingkan dengan daerah-daerah terpinggir dan terpencil yang masih berjuang untuk mengejar ketertinggalan. Ketimpangan mengakibatkan masalah aksesibilitas, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi sangat terhambat. Masalah-masalah ini harus segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia, diharapkan berbagai sektor ekonomi krusial di berbagai daerah terpencil dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Selain tantangan domestik, Indonesia juga harus siap dalam menghadapi persaingan ekonomi di tingkat internasional. Di tengah pesatnya arus globalisasi, Indonesia perlu memperkuat posisi sebagai pemain penting dalam perdagangan internasional serta investasi asing. Untuk mencapai hal ini, diperlukannya berbagai prioritas yang harus diutamakan. Hal-hal penting seperti kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas makroekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi penting untuk diperhatikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia akan dapat terus meningkatkan daya tarik peluang investasi di mata investor global, dan memperluas kontribusi dalam ekonomi dunia.

Penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal sejarah perkembangan ekonomi, struktur sektoral, dan kebijakan ekonomi

dari masa ke masa. Wawasan mengenai hal-hal tersebut dapat mendukung dalam peningkatan kesadaran tentang bagaimana ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sejarah dan kebijakan ekonomi, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan yang diterapkan saat ini dan di masa depan. Wawasan terhadap hal-hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk melihat peluang dalam berbagai sektor ekonomi yang berkembang. masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan yang diterapkan saat ini dan di masa depan.

#### **A. SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA**

Sejarah perkembangan ekonomi merupakan aspek penting dalam memahami perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang telah membentuk dunia saat ini. Melalui sejarah ekonomi, dapat dilihat bagaimana pola-pola perkembangan yang digunakan pada silam untuk membawa kemakmuran atau kemunduran bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Berbagai pemikiran dan konsep yang telah dicetuskan oleh para ilmuwan dan pencetus gerakan ekonomi pada berbagai masa dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan langkah pada masa kini. Sejarah menawarkan pelajaran berharga mengenai bagaimana keputusan ekonomi yang diambil di masa lalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pada "*A Farewell to Alms*" oleh Gregory Clark, dituliskan bahwa sejarah ekonomi memiliki peran yang amat krusial dalam memahami

ketidaksetaraan global yang terjadi pada masa lampau hingga masa kini. Clark berpendapat bahwa sejarah menyediakan perspektif mengenai penjelasan bagaimana beberapa negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat, sedangkan beberapa negara lainnya masih tertinggal. Sejarah memperlihatkan bagaimana inovasi, revolusi industri, serta kebijakan-kebijakan pemerintah membentuk jalur pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Masyarakat dapat mempelajari akar penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi, sehingga dapat memberikan solusi dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif.

Rondo Cameron dan Larry Neal (2003) juga menyebutkan pendapat mereka mengenai sejarah perkembangan ekonomi pada "*Economic History of the World*". Cameron dan Neal memperlihatkan bagaimana perkembangan ekonomi dunia dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial yang terjadi pada berbagai wilayah, bagi sejak zaman prasejarah hingga era modern pada masa kini. Dalam pandangan mereka, sejarah ekonomi bukan hanya tentang perhitungan statistik, melainkan turut memberikan narasi yang menggambarkan hubungan antara kekuatan-kekuatan global seperti perdagangan internasional, kolonialisme, dan perang. Masyarakat mempelajari hal-hal tersebut untuk memahami dinamika perubahan yang mempengaruhi perekonomian global, dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut membentuk struktur ekonomi yang saat dikenal dan diterapkan pada berbagai wilayah di dunia.

Robert C. Allen dalam "*Global Economic History: A Very Short Introduction*" turut menyajikan alasan mengapa penting unruk mempelajari sejarah ekonomi. Menurut Allen (2011), sejarah adalah kunci untuk memahami transformasi besar dalam distribusi kekayaan di dunia. Beliau turut menyoroti bagaimana kemajuan teknologi, perdagangan, dan kebijakan ekonomi di berbagai era mengubah cara orang hidup dan bekerja. Masyarakat mempelajari sejarah perkembangan ekonomi untuk mengidentifikasi momen-momen kritis yang menyebabkan berbagai perubahan besar tersebut. Wawasan mengenai fenomena-fenomena tersebut akan memberikan gambaran dalam menghadapi tantangan ekonomi pada masa yang akan datang.

Buku *Why Nations Fail* karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson juga memberikan beberapa pemahaman mengenai pentingnya sejarah perkembangan ekonomi bagi masyarakat dunia. Acemoglu dan Robinson (2012) memberikan pendekatan yang lebih berbasis institusi terhadap pentingnya memahami sejarah perkembangan ekonomi. Mereka menyoroti bahwa kemakmuran suatu negara sangat bergantung pada kualitas institusi atau kelembagaan politik dan ekonomi yang berkembang melalui sejarah. Dengan mempelajari berbagai kelembagaan ekonomi dibentuk serta berbagai perubahan yang telah dialami, masyarakat dapat belajar tentang penyebab kegagalan dan keberhasilan perkembangan ekonomi di berbagai negara. Sejarah ekonomi menawarkan pelajaran kritis mengenai kebijakan dan sistem pemerintahan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan dan stagnasi ekonomi, serta bagaimana sebaliknya bila

kelembagaan bersifat kuat dan mengayomi masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah yang sangat strategis dan memiliki potensi besar dalam kegiatan perekonomian global, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memahami perkembangan ekonomi di negara mereka. Wawasan tersebut menjadi krusial dengan keberlangsungan kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ekonomi di Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dapat dilihat pada pembuatan keputusan dalam hal keuangan pribadi, seperti investasi, pengelolaan anggaran, dan pemanfaatan peluang ekonomi yang tersedia. Sementara itu, secara tidak langsung meliputi kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Pengetahuan ini dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum, di mana masyarakat yang paham ekonomi lebih cenderung mendukung kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan inklusif dan pemerataan kesejahteraan.

Anne Booth (1998) pada Buku *Sejarah Ekonomi Indonesia* menjelaskan bahwa kebijakan perkembangan ekonomi Indonesia telah dilalui sejak masa kolonial. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi pada masa kolonial dirancang untuk kepentingan penjajah, terutama dalam hal eksploitasi sumber daya alam. Warisan kebijakan ekonomi pada masa kolonial ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang berpengaruh hingga masa kini. Mempelajari sejarah ekonomi Indonesia ini akan membantu masyarakat untuk memahami akar dari

masalah-masalah ekonomi yang masih ada. Kelak, pembelajaran dari masa lalu akan membantu dalam menyadarkan akan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih merata.

Buku *Indonesia: The Rise of Capital* oleh Richard Robison juga menyoroti pentingnya memahami sejarah perkembangan kapitalisme di Indonesia, khususnya setelah kemerdekaan. Robison menguraikan bagaimana perkembangan ekonomi pascakolonial dipengaruhi oleh hubungan erat antara kapitalisme dan kekuasaan politik. Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan keuntungan besar yang dirasakan oleh segelintir elit politik dan ekonomi. Sementara itu sebagian masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang setara. Dengan memahami dinamika ini, masyarakat dapat lebih kritis terhadap struktur kekuasaan yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan peluang ekonomi di Indonesia.

Terdapat pula pendapat dari Tulus Tambunan pada Buku *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Beliau menggarisbawahi bagaimana pada setiap periode pemerintahan di Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pembangunan ekonomi, dengan fokus pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian, industri, dan jasa. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengenali perkembangan yang terjadi, masyarakat Indonesia dapat memahami bagaimana keputusan di masa lalu membentuk ekonomi saat ini dan mempengaruhi peluang kerja serta distribusi kekayaan antar sektor.

Mengenal sejarah ekonomi tidak hanya sekedar memahami masa lalu, melainkan juga menjadi panduan untuk mempersiapkan masa depan. Sejarah ekonomi memberikan gambaran jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam perjalanan ekonominya. Dengan wawasan ini, masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, mendukung kebijakan yang berkelanjutan, dan menuntut reformasi yang lebih adil demi kesejahteraan bersama.

### **Sejarah Perkembangan Ekonomi pada Era Kolonial: Dampak Kolonialisme terhadap Ekonomi Indonesia**

Kolonialisme memiliki berbagai dampak terhadap perkembangan ekonomi Indonesia selama beberapa abad. Sebelum kedatangan kolonial Bangsa Eropa, Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berakar pada perdagangan antar pulau disertai dengan beberapa negara-negara Asia sekitar seperti India dan Cina. Namun pada masa kolonialisme Eropa, khususnya Belanda yang mulai mendominasi wilayah Nusantara, struktur ekonomi tradisional berubah secara drastis. Anne Booth (1998) mencatat bahwa kolonialisme mengubah fokus ekonomi lokal dari sistem agraris dan perdagangan kecil menjadi ekonomi berbasis ekspor komoditas. Ekspor komoditas yang dihasilkan diutamakan untuk memproduksi hasil yang menguntungkan kepentingan Eropa. Sektor perkebunan mulai berkembang pesat dengan komoditas seperti kopi, teh, tembakau, dan karet yang menjadi produk utama.

Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19 merupakan salah

satu contoh nyata eksploitasi ekonomi terhadap Indonesia. Melalui kebijakan ini, rakyat pribumi dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kepentingan Belanda. Hasil dari budidaya tanaman tersebut akan dijual di pasar dunia untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Tulus Tambunan (2010) dalam *Sejarah Perekonomian Indonesia* menjelaskan bahwa sistem tanam paksa mengakibatkan kesengsaraan yang luas bagi masyarakat lokal. Kerugian paling dirasakan para petani yang terpaksa melepaskan sebagian besar hasil panen untuk memenuhi tuntutan kolonial. Sebagai akibatnya, kelaparan dan kemiskinan meluas di banyak daerah di Jawa, di tengah keuntungan besar yang diperoleh pemerintah kolonial.

Sementara itu, Richard Robison (1986) dalam Buku *Indonesia: The Rise of Capital* menyoroti dampak jangka panjang dari kolonialisme terhadap struktur sosial-ekonomi Indonesia. Selama era kolonial, kekayaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir elit kolonial dan penguasa Eropa. Sementara itu, sebagian besar penduduk pribumi tetap terjebak dalam kemiskinan. Kolonial menciptakan kesenjangan sosial yang sangat tajam. Rakyat pribumi hanya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan kekayaan yang dihasilkan oleh tanah mereka sendiri. Ketidaksetaraan ini bertahan bahkan setelah Indonesia merdeka, dan warisan kolonial ini terus memengaruhi dinamika ekonomi dan politik negara hingga hari ini.

Di sisi lain, kolonialisme juga memperkenalkan modernisasi dalam bidang infrastruktur ekonomi. Anne Booth (1998) mencatat bahwa meskipun pemerintah kolonial bersifat eksploitatif terhadap hasil

panen masyarakat pribumi, pemerintah kolonial turut mendukung pembangunan jaringan jalan, jalur kereta api, serta pelabuhan yang bertujuan mempermudah ekspor komoditas pertanian. Namun, infrastruktur tersebut lebih diutamakan untuk dirancang sebagai pemenuhan kebutuhan kolonial dalam pengiriman hasil-hasil bumi ke Eropa. Sementara akses masyarakat pribumi terhadap infrastruktur tersebut sangat terbatas. Hal ini memperkuat ketergantungan Indonesia pada ekspor barang mentah, yang berakibat pada kecilnya pengembangan industri lokal.

Salah satu dampak kolonialisme yang mencolok lainnya adalah munculnya sistem dualisme ekonomi. Richard Robison (1986) memaparkan bahwa ekonomi kolonial menciptakan dualisme antara sektor modern. Sektor pertama didominasi oleh penguasa Eropa dan beberapa penguasa Tionghoa, sektor lainnya yaitu sektor tradisional yang melibatkan mayoritas penduduk pribumi. Sektor modern terdiri dari perkebunan, pertambangan, dan perdagangan besar menguasai ekspor. Sementara itu, sektor tradisional tetap bergantung pada pertanian subsisten dan produksi skala kecil. Dualisme ini mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan, dengan kesenjangan antara sektor modern dan tradisional tetap menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Tulus Tambunan (2010) juga menekankan bahwa kolonialisme menciptakan ketergantungan ekonomi Indonesia pada komoditas ekspor tunggal. Hal ini mengakibatkan Indonesia sangat rentan

terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas seperti kopi, karet, atau gula jatuh di pasar internasional, ekonomi Indonesia akan langsung terdampak. Hal ini sangat sering mengakibatkan krisis ekonomi domestik. Ketergantungan ini juga menghambat diversifikasi ekonomi. Hal ini mengakibatkan pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang lebih stabil dan berkelanjutan setelah masa kemerdekaan.

Meski demikian, kolonialisme juga memunculkan awal mula kapitalisme di Indonesia. Richard Robison (1986) mencatat bahwa pengenalan sistem ekonomi pasar yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial telah membuka jalan bagi perkembangan kapitalisme di Indonesia, meskipun bersifat eksploitatif. Munculnya berbagai perusahaan besar yang mengelola perkebunan dan pertambangan menciptakan kelas kapitalis awal, meskipun sebagian besar merupakan pengusaha dari Eropa. Kelas kapitalis lokal mulai berkembang setelah kemerdekaan. Namun tetap terdapat banyak hambatan bagi keberlangsungannya, terutama terkait dengan warisan struktur ekonomi kolonial yang masih sangat berpengaruh.

Anne Booth turut menyoroti dampak kebijakan kolonial terhadap distribusi lahan di Indonesia. Kolonialisme menerapkan sistem kepemilikan lahan yang menguntungkan elit kolonial dan para pengusaha besar. Sementara itu, rakyat kecil sering kehilangan hak atas tanah mereka sendiri. Ketidakaadilan distribusi lahan ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut hingga era pasca kolonial. Petani pribumi hanya memiliki sedikit akses

terhadap tanah subur di berbagai daerah, yang sering kali telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah kolonial.

Masa kolonialisme tidak hanya membentuk ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, tetapi juga mewariskan tantangan ekonomi jangka panjang yang harus dihadapi setelah kemerdekaan. Struktur ekonomi yang didasarkan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam dan ketergantungan pada ekspor komoditas tetap menjadi karakteristik utama ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Warisan kolonial ini terus mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia hingga era modern. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memodernisasi ekonomi di tengah tantangan global.

### **Sejarah Perkembangan Ekonomi Indonesia Masa Orde Lama: Kebijakan Ekonomi di Bawah Soekarno**

Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kebijakan ekonomi Indonesia mengalami berbagai tantangan yang signifikan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang bebas dari pengaruh kolonial. Namun, kondisi ekonomi yang masih terbelakang serta warisan kolonial menyebabkan kebijakan ekonomi pada masa ini cenderung tidak stabil. Anne Booth (1998) menjelaskan bahwa Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, ketergantungan pada komoditas ekspor, dan lemahnya infrastruktur ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Hal ini memaksa pemerintahan di bawah Soekarno untuk mencari solusi untuk memperkuat perekonomian nasional.

Pada sekitar akhir tahun 1950, Soekarno mulai mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih bersifat radikal, yang dikenal dengan sebutan Ekonomi Terpimpin. Kebijakan ini bertujuan untuk menggantikan model ekonomi pasar bebas yang sebelumnya dipraktikkan dengan model ekonomi yang lebih terkontrol oleh negara. Tulus Tambunan (2010) menyebutkan dalam Sejarah Perekonomian Indonesia bahwa terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan Belanda, pada masa Ekonomi Terpimpin. Upaya yang dilakukan dalam sistem ekonomi ini adalah memusatkan kontrol ekonomi di tangan pemerintah. Nasionalisasi ini dilakukan untuk mengurangi dominasi asing dalam ekonomi Indonesia, meskipun banyak perusahaan yang dinasionalisasi mengalami kesulitan manajerial setelah diambil alih.

Salah satu aspek penting dari kebijakan ekonomi Soekarno adalah program pembangunan infrastruktur yang ambisius. Soekarno percaya bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan monumen nasional, jalan raya, dan proyek-proyek besar lainnya, akan memperkuat kedaulatan dan martabat bangsa. Richard Robison (1986) menyebutkan bahwa meskipun program pembangunan ini memiliki tujuan politik dan ideologis yang kuat, dampaknya kurang efektif. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pendanaan yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang masif sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang, sehingga menambah beban pada anggaran negara yang sudah terbatas.

Selain itu, kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama sangat dipengaruhi oleh hubungan internasional dan politik global. Soekarno berupaya dalam menjauhkan Indonesia dari blok Barat dan mendekatkan diri pada blok Timur, khususnya Uni Soviet dan Tiongkok (Booth, 1998). Hubungan dengan negara-negara komunis juga tercermin dalam kebijakan ekonomi, yaitu pada aspek penerimaan bantuan ekonomi militer dari negara-negara tersebut. Namun, kebijakan ini menyebabkan ketegangan dengan negara-negara barat. Sehingga terjadilah hambatan bantuan ekonomi internasional untuk Indonesia, termasuk dari lembaga-lembaga keuangan global seperti Bank Dunia dan IMF.

Kebijakan ekonomi Soekarno juga dipengaruhi oleh gagasan revolusi ekonomi yang menekankan pada redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Soekarno sering berbicara tentang perlunya revolusi ekonomi untuk membebaskan rakyat Indonesia dari ketergantungan pada kapitalisme global. Tulus Tambunan (2010) mencatat bahwa meskipun ide revolusi ekonomi ini populer dalam retorika politik, penerapannya di lapangan sering kali tidak efektif. Sebagai contoh, redistribusi tanah dan reformasi agraria yang seharusnya menjadi pilar kebijakan ekonomi Orde Lama, gagal dilaksanakan dengan baik. Hal ini mengakibatkan masalah utama tetap berada pada ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks politik domestik, Robison (1986) menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Soekarno sering dipengaruhi oleh kekuatan politik yang beragam, termasuk kemiliteran, partai-partai politik, dan

kelompok komunis. Konflik kepentingan antara kelompok-kelompok ini menyebabkan kebijakan ekonomi tidak menjadi konsisten. Ekonomi terpimpin yang seharusnya membawa stabilitas ekonomi, justru semakin memperparah masalah inflasi dan defisit anggaran. Inflasi yang meroket pada awal tahun 1960-an membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Sementara itu, pemerintah terus mencetak uang untuk membiayai proyek-proyek besar dan belanja militer.

Tulus Tambunan juga menekankan bahwa pada masa Orde Lama, kebijakan ekonomi sering kali bersifat populis dan ideologis. Ini berarti bahwa kebijakan ekonomi lebih mementingkan retorika politik daripada kestabilan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan nasionalisasi perusahaan asing dihadapkan pada kendala teknis dan manajerial yang serius, hal disebabkan oleh minimnya kapasitas Indonesia untuk mengelola perusahaan-perusahaan besar pada masa itu. Akibatnya, banyak perusahaan yang dinasionalisasi menjadi tidak produktif dan mengalami kerugian, yang akhirnya membebani ekonomi nasional.

Anne Booth (1998) menyatakan bahwa salah satu kegagalan besar kebijakan ekonomi Soekarno adalah ketidakmampuan dalam mengatasi masalah utang luar negeri. Pada masa itu, Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran yang signifikan dengan utang luar negeri yang terus meningkat. mencatat bahwa salah satu kegagalan besar kebijakan ekonomi Soekarno adalah ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah utang luar negeri. Bantuan ekonomi dari negara-negara blok timur tidak cukup untuk

menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Sebagai akibatnya, pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah drastis, seperti menasionalisasi aset-aset asing, yang justru memperburuk hubungan dengan negara-negara Barat dan memperparah krisis ekonomi.

Pada akhirnya, kebijakan ekonomi Soekarno selama masa Orde Lama meninggalkan warisan yang rumit bagi Indonesia. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada asing, kebijakan-kebijakan ini sering kali gagal diterapkan secara efektif. Richard Robison (1986) menyimpulkan bahwa salah satu warisan terbesar dari era Orde Lama adalah ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan. Ketidakstabilan ini yang akhirnya memaksa munculnya kebijakan ekonomi yang lebih pragmatis di bawah Orde Baru. Meskipun demikian, ide-ide revolusi ekonomi dan semangat nasionalisme ekonomi Soekarno tetap menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi Indonesia.

### **Sejarah Perkembangan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru: Kebijakan Ekonomi di Bawah Soeharto, Industrialisasi, dan Pembangunan**

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kebijakan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Tujuan pengembangan ekonomi pada masa itu adalah untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Setelah masa-masa kekacauan ekonomi dan politik di akhir Orde Lama, Soeharto berupaya untuk mengembalikan kepercayaan dalam perekonomian

dengan memprioritaskan stabilitas makroekonomi. Anne Booth dalam bukunya *Sejarah Ekonomi Indonesia* menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru sangat berfokus pada pengendalian inflasi, stabilisasi anggaran, dan reformasi ekonomi yang didukung oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Soeharto turut menggandeng teknokrat, yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley," untuk merancang kebijakan ekonomi yang pragmatis dan bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Kebijakan awal yang diterapkan pada masa jabatan Soeharto berfokus pada reformasi moneter dan fiskal. Pemerintah berhasil menurunkan inflasi yang sangat tinggi dengan menghentikan pencetakan uang yang berlebihan serta mengendalikan pengeluaran pemerintah. Tambunan (2010) turut memaparkan bahwa reformasi ini melibatkan penyusunan anggaran yang lebih realistis serta penerapan kebijakan yang mendukung pengendalian harga dan subsidi. Stabilitas ekonomi yang berhasil dicapai pada awal Orde Baru ini memungkinkan pemerintah untuk mulai merencanakan pembangunan ekonomi jangka panjang yang lebih terstruktur.

Salah satu pilar utama kebijakan ekonomi Orde Baru adalah industrialisasi. Richard Robison (1986) dalam bukunya yaitu *Indonesia: The Rise of Capital*, menjelaskan bahwa Soeharto melihat industrialisasi sebagai jalan utama untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan ekspor komoditas mentah. Melalui program pembangunan jangka panjang, yang disebut sebagai Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemerintah pada masa itu memprioritaskan pengembangan pada sektor industri. Prioritas tersebut dikembangkan baik pada industri manufaktur ringan maupun berat. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

Pemerintah pada masa jabatan Soeharto juga mengadopsi kebijakan yang pro-investasi, baik domestik maupun asing, untuk mendukung industrialisasi. Booth (1986) mencatat bahwa pada akhir 1960-an dan 1970-an, pemerintah mulai membuka pintu bagi investor asing untuk menanamkan modal di berbagai sektor ekonomi. Investor asing sangat diutamakan berada pada sektor industri. Pemberian insentif fiskal dan kemudahan regulasi berfungsi untuk menarik investasi asing menjadi bagian dari strategi ini. Sebagai hasilnya, Indonesia mengalami lonjakan dalam pertumbuhan industri manufaktur. Pertumbuhan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama periode tersebut.

Selain industrialisasi, kebijakan pembangunan di bawah Soeharto juga mencakup program pembangunan pedesaan yang dikenal sebagai Inpres (Instruksi Presiden). Tambunan (2010) menyebutkan bahwa kebijakan Inpres bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, yang tetap menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian besar

penduduk Indonesia. Meski fokus pada industrialisasi, sektor pertanian tetap diperhatikan melalui kebijakan intensifikasi dan modernisasi pertanian.

Pembangunan pada masa Orde Baru juga sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Robison (1986) menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan negara melalui eksploitasi minyak bumi, gas alam, serta sumber daya mineral lainnya. Pada awal 1970-an, Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia ketika harga minyak dunia melonjak. Pendapatan dari sektor ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan besar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, ketergantungan pada pendapatan minyak ini juga menjadi salah satu kelemahan ekonomi Indonesia, terutama ketika harga minyak turun drastis di tahun 1980-an.

Sekitar tahun 1980-an, pemerintah Soeharto mulai menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Anne Booth (1998) menjelaskan bahwa pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar, termasuk liberalisasi perdagangan dan deregulasi sektor keuangan pada periode ini. Langkah ini diambil untuk mendorong ekspor non-migas, serta memperkuat sektor manufaktur sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Upaya ini terbukti berhasil dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional melalui ekspor produk-produk manufaktur seperti tekstil, elektronik, dan sepatu yang mulai mendominasi perdagangan luar negeri.

Namun, meskipun kebijakan ekonomi Orde Baru berhasil menciptakan pertumbuhan yang impresif, terdapat berbagai masalah struktural yang muncul. Tulus Tambunan (2010) menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu disertai dengan pemerataan kesejahteraan. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, sementara ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi isu serius. Ketergantungan pada investasi asing dan utang luar negeri juga meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal, yang puncaknya terlihat saat krisis ekonomi Asia tahun 1997.

Richard Robison (2016) juga menyoroti bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, terdapat masalah serius dalam hal korupsi dan nepotisme. Selama masa Orde Baru, kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di tangan elit politik dan militer yang dekat dengan Soeharto. Monopoli dan oligopoli yang didukung oleh pemerintah menciptakan kelompok-kelompok bisnis besar yang mengendalikan sebagian besar sektor ekonomi. Sementara itu sebagian besar rakyat tetap berada di luar lingkaran kekuasaan ekonomi. Korupsi yang merajalela ini menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan fondasi ekonomi Indonesia, dan turut berperan dalam runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir 1990-an.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi di bawah Soeharto pada masa Orde Baru membawa Indonesia ke era industrialisasi dan

pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, keberhasilan ini datang dengan biaya yang besar, termasuk ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya alam, dan masalah struktural yang akhirnya mengguncang fondasi ekonomi negara. Meskipun era Orde Baru milik Soeharto berhasil menciptakan stabilitas ekonomi, warisan Orde Baru yang penuh dengan korupsi, ketergantungan, dan ketidaksetaraan ekonomi terus memengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia hingga era reformasi.

### **Sejarah Perkembangan Ekonomi Indonesia Masa Reformasi dan Pasca-Reformasi: Krisis Ekonomi 1998 dan Kebijakan Pasca-Reformasi**

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Krisis ini menjadi bagian dari krisis ekonomi Asia yang melanda beberapa negara di kawasan tersebut. Krisis dimulai dengan jatuhnya nilai tukar mata uang, khususnya rupiah, yang mengalami devaluasi tajam terhadap Dolar AS. Tulus Tambunan dalam Sejarah Perekonomian Indonesia menjelaskan bahwa krisis ini dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi yang sudah lama mengakar, termasuk ketergantungan pada utang luar negeri, lemahnya sektor perbankan, dan masalah korupsi. Krisis ekonomi ini menjadi katalis bagi runtuhnya Orde Baru, dengan tumbangnya Soeharto dari kursi kepresidenan setelah lebih dari 30 tahun berkuasa.

Salah satu dampak terbesar dari krisis 1998 adalah inflasi yang melonjak drastis. Inflasi yang melonjak menyebabkan harga barang kebutuhan pokok naik tajam dan mengakibatkan penurunan daya beli

masyarakat. Anne Booth (1998) menyatakan bahwa krisis ini menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah penduduk miskin. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat tutupnya berbagai perusahaan pada saat itu. Ketergantungan Indonesia pada impor bahan pokok seperti beras dan gula semakin memperburuk situasi, dikarenakan harga impor menjadi tidak terkendali akibat melemahnya rupiah.

Dalam upaya menangani krisis, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie mengambil langkah-langkah drastis dengan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*). Robison (1986) turut menjelaskan bahwa pemerintah mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi yang mencakup restrukturisasi sektor perbankan, pengurangan subsidi, dan deregulasi pasar. Lembaga IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia dengan syarat bahwa pemerintah harus menerapkan reformasi ekonomi yang ketat, termasuk privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan reformasi fiskal. Meski kebijakan ini diperlukan untuk menstabilkan ekonomi, banyak yang mengkritik bahwa syarat-syarat IMF terlalu keras dan merugikan rakyat kecil.

Pada pasca-reformasi, salah satu fokus utama pemerintah adalah memulihkan sektor perbankan yang lumpuh akibat krisis. Tambunan (2010) menyoroti bahwa lebih dari setengah bank di Indonesia dinyatakan bangkrut atau bermasalah pada puncak krisis. Pemerintah Indonesia melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) mengambil alih bank-bank yang tidak sehat dan mulai melakukan

proses restrukturisasi dan rekapitalisasi untuk mengembalikan kepercayaan pada sektor keuangan. Langkah ini termasuk proses privatisasi dan merger pada beberapa bank besar. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih stabil dan efisien.

Selain itu, salah satu perubahan terbesar dalam kebijakan ekonomi pasca-reformasi adalah desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Anne Booth (1998) pada bukunya menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kendali kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan fiskal mereka. Dengan diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Indonesia memasuki era baru. Daerah kini memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Meskipun demikian, desentralisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait korupsi di tingkat lokal dan ketimpangan antar daerah.

Reformasi ekonomi yang dilakukan setelah krisis juga melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi. Richard Robison (1986) memaparkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya membuka perekonomian dengan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan memberikan insentif bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan aliran investasi langsung asing, atau disebut *Foreign Direct Investment* (FDI), yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-krisis. Sektor-sektor seperti manufaktur, pertambangan, dan perkebunan

mulai mengalami pemulihan, meskipun pemulihan secara menyeluruh baru dirasakan beberapa tahun kemudian.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Tulus Tambunan mencatat bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi dengan fokus pada pengelolaan inflasi, pengurangan utang luar negeri, dan peningkatan cadangan devisa. Salah satu pencapaian penting adalah pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, meskipun ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang signifikan.

Meskipun perekonomian Indonesia mulai bangkit, tantangan struktural tetap ada. Ketergantungan pada ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Krisis keuangan global tahun 2008 juga memberikan tekanan pada ekonomi Indonesia, meskipun dampaknya tidak separah krisis 1998. Pemerintah berupaya memperluas basis ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi, seperti manufaktur dan jasa.

Pada era pasca-reformasi, kebijakan ekonomi Indonesia juga berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan. Pemerintah menyadari bahwa kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi hambatan utama bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas. Program pembangunan infrastruktur besar-

besaran, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara, dicanangkan untuk mendukung industrialisasi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Pembangunan ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Secara keseluruhan, masa reformasi dan pasca-reformasi menandai babak baru dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi pada tahun 1998 menjadi titik balik yang memaksa Indonesia melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem ekonomi dan politik. Kebijakan pasca-reformasi berfokus pada stabilisasi ekonomi, restrukturisasi perbankan, desentralisasi kekuasaan, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun Indonesia berhasil bangkit dari krisis, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada ekspor komoditas, dan korupsi masih menjadi isu yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

## **B. STRUKTUR EKONOMI INDONESIA (SEKTOR PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER)**

Pelaksanaan pertumbuhan ekonomi memiliki struktur dalam penentuan tingkat prioritas sektor-sektor terkait. Di Indonesia, struktur ekonomi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Menurut Martin Andersson dan Christer Gunnarsson dalam *Development and Structural Change in the Asia-Pacific*, struktur ekonomi yang terencana dan terarah memungkinkan negara untuk beradaptasi

dengan perubahan global dan tantangan domestik. Dengan memahami dan mengelola distribusi kegiatan ekonomi di berbagai sektor, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional

Hal Hill dalam *Economic Development in Southeast Asia* menekankan bahwa struktur ekonomi yang baik membantu dalam diversifikasi sumber-sumber pendapatan negara, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Hal ini penting untuk menghadapi risiko ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas atau perubahan dalam rantai pasok internasional. Melalui diversifikasi ekonomi, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan ekonominya dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Struktur ekonomi yang terarah juga memungkinkan adanya distribusi yang lebih merata dalam hal pembangunan dan pertumbuhan antar wilayah di Indonesia. M. D. Patria dalam *Struktur Ekonomi Indonesia* menjelaskan bahwa pengaturan struktur ekonomi yang baik tidak hanya memperhatikan peningkatan produktivitas. Patria (2007) juga menekankan bahwa struktur ekonomi juga mencakup pemerataan manfaat pembangunan ke seluruh wilayah negara. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan sehingga menciptakan kemakmuran yang lebih inklusif.

Selain itu, struktur ekonomi yang efektif mampu mendorong inovasi dan peningkatan daya saing internasional. Andersson dan Gunnarsson (2003) mencatat bahwa di kawasan Asia-Pasifik, negara-negara yang

memiliki struktur ekonomi yang jelas lebih mampu mengintegrasikan teknologi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Bagi Indonesia, hal ini sangat penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan meningkatnya peran ekonomi digital dan industri kreatif.

Secara umum, terdapat tiga klasifikasi sektor perekonomian yang digunakan di Indonesia. Ketiga klasifikasi tersebut terdiri dari Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier. Sektor Primer perekonomian di Indonesia terdiri dari sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sektor Sekunder terdiri dari sektor industri manufaktur, konstruksi, dan energi. Dan Sektor Tersier terdiri dari jasa, perdagangan, pariwisata, dan teknologi informasi.

### **Sektor Primer**

Sektor primer dalam struktur ekonomi Indonesia mencakup kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sektor-sektor tersebut terdiri dari pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sektor-sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, terutama pada masa awal kemerdekaan. Dapat dikatakan pula bahwa sektor primer merupakan sektor yang amat krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Tanpa sektor primer, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus melakukan produksi untuk sektor-sektor lainnya.

Menurut Martin Andersson dan Christer Gunnarsson dalam *Development and Structural Change in the Asia-Pacific*, sektor primer

adalah salah satu sektor pertama yang berkembang di negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, sebagai respons terhadap kebutuhan lokal dan internasional akan bahan baku. Sektor ini mencakup kegiatan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, yang menjadi tulang punggung perekonomian pada tahap awal masa industrialisasi. Di Indonesia, sektor primer memainkan peran penting dalam menyediakan bahan dasar bagi industri domestik, sekaligus menjadi sumber utama devisa melalui ekspor produk mentah. Produksi unggulan Indonesia yang diekspor ke pasar global diantaranya adalah minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan mineral.

Peran sektor primer di Indonesia tidak hanya penting dalam hal kontribusi ekonomi, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Ketergantungan penyediaan lapangan kerja pada sektor primer banyak digeluti pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. M. D. Patria (2007) dalam *Struktur Ekonomi Indonesia* menyatakan bahwa sektor ini masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Meskipun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan seiring dengan berkembangnya sektor sekunder dan tersier, peran sosial-ekonomi sektor ini tetap tidak bisa diabaikan.

Di sisi lain, Hal Hill dalam *Economic Development in Southeast Asia* menyoroti bahwa sektor primer di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal produktivitas. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini berhadapan dengan isu seperti

keterbatasan teknologi, akses modal yang terbatas, serta ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas mentah. Masalah ini telah membatasi kemampuan sektor primer untuk berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu transformasi penting yang terjadi di sektor primer Indonesia adalah pergeseran dari pertanian tradisional ke penggunaan teknologi yang lebih modern. Andersson dan Gunnarsson mencatat bahwa proses globalisasi telah mendorong perubahan di sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi canggih menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pertanian. Namun, tantangan ini membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat agar dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Patria (2007), sektor primer juga menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar. Peningkatan aktivitas pertambangan, konversi lahan pertanian untuk keperluan industri, serta deforestasi untuk perkebunan telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kelestarian sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Selain hal yang telah disebutkan di atas, Hill (1996) menekankan bahwa sektor primer Indonesia masih sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketergantungan pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, karet, dan batu bara membuat

perekonomian domestik terpengaruh oleh dinamika pasar internasional yang tidak selalu stabil. Ketika harga komoditas anjlok, pendapatan negara dari sektor ini menurun drastis, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

Perkembangan sektor primer di Indonesia juga berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Andersson dan Gunnarsson (2003) menyatakan terdapat banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki sistem pemerintahan yang memainkan peran besar dalam mendorong modernisasi sektor primer melalui berbagai inisiatif kebijakan. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan sektor primer dengan sektor-sektor lain dalam ekonomi nasional.

Sebagai upaya dari bagian meningkatkan daya saing sektor primer, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Patria (2007) menulis pada penelitiannya bahwa dengan adanya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, sektor primer dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman dan menjadi lebih produktif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sektor primer yang lebih modern dan efisien akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Meskipun kontribusi sektor primer terhadap PDB Indonesia menurun, peran sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, serta menjadi sumber devisa tetap

krusial. Maka dari itu, pengembangan sektor primer memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pengembangan tersebut mencakup modernisasi teknologi, kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, serta pengurangan ketergantungan pada komoditas ekspor mentah.

### **Sektor Sekunder**

Sektor sekunder dalam struktur ekonomi Indonesia memiliki peran yang semakin penting seiring dengan perkembangan industrialisasi dan modernisasi. Sektor ini mencakup kegiatan manufaktur dan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku dari sektor primer. Menurut Martin Andersson dan Christer Gunnarsson (2003) dalam *Development and Structural Change in the Asia-Pacific*, perkembangan sektor sekunder merupakan bagian integral dari transformasi struktural di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Pada kawasan ini, industrialisasi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi global.

Hill (1996) dalam *Economic Development in Southeast Asia* menjelaskan bahwa sektor sekunder telah menjadi motor utama dalam roda perekonomian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan industrialisasi yang diterapkan sejak era Orde Baru berhasil mendorong pertumbuhan industri manufaktur, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Sektor ini menjadi sumber utama pendapatan bagi negara pada saat itu, dan berhasil menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja dengan berbagai keterampilan.

Namun, pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Patria (2007) mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah masih rendahnya daya saing industri manufaktur Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Masalah infrastruktur yang belum memadai, birokrasi yang rumit, serta akses terbatas terhadap teknologi canggih menjadi penghambat utama dalam meningkatkan produktivitas sektor ini.

Tulisan Andersson dan Gunnarsson (2003) juga menyoroti pentingnya peran investasi asing dalam pengembangan sektor sekunder di Indonesia. Banyak perusahaan manufaktur di Indonesia merupakan hasil dari investasi asing langsung (FDI) yang mendorong transfer teknologi dan keterampilan. Namun, ketergantungan yang tinggi pada investasi asing juga membuat sektor ini rentan terhadap perubahan kebijakan investasi global dan fluktuasi ekonomi internasional.

Selain itu, Hal Hill (1996) menyebutkan bahwa sektor sekunder di Indonesia sering menghadapi tekanan ketidakseimbangan struktur ekonomi di dalam negeri. Sebagai contoh, ketimpangan antara pertumbuhan industri di Pulau Jawa dan luar Jawa masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Pulau Jawa sebagai pusat industrialisasi mengalami perkembangan pesat, sementara wilayah lain di Indonesia masih kurang berkembang. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan di antara berbagai daerah.

Di sisi lain, M. D. Patria menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah dalam sektor manufaktur. Transformasi dari produksi barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi atau produk akhir sangat penting untuk meningkatkan daya saing internasional. Indonesia masih banyak mengandalkan ekspor bahan mentah atau produk dengan nilai tambah rendah. Hal ini mengurangi potensi maksimal dari sektor sekunder. Upaya untuk meningkatkan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor industri harus menjadi prioritas pemerintah.

Pertumbuhan sektor sekunder juga erat kaitannya dengan perkembangan sektor jasa pendukung. Sebagai contohnya adalah seperti transportasi dan logistik. Andersson dan Gunnarsson (2003) menjelaskan bahwa integrasi yang kuat antara sektor sekunder dan tersier sangat penting dalam mendukung efisiensi dan pertumbuhan industri manufaktur. Sistem logistik yang efektif dapat membantu memperlancar distribusi produk, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, sektor sekunder di Indonesia harus bertransformasi agar tetap relevan dan kompetitif (Hill, 1996). Pengadopsian teknologi digital dan otomatisasi dalam proses manufaktur menjadi suatu keharusan agar sektor sekunder tidak tertinggal.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti masalah infrastruktur, ketergantungan pada investasi asing, dan kesenjangan regional, sektor sekunder memiliki potensi besar untuk terus

berkembang. Kunci keberhasilan sektor sekunder terletak pada kebijakan yang mendorong inovasi, modernisasi industri, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi persaingan global.

### **Sektor Tersier**

Sektor tersier dalam struktur ekonomi Indonesia mencakup berbagai layanan dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti transportasi, perdagangan, komunikasi, perbankan, pariwisata, serta jasa keuangan. Seiring perkembangan ekonomi dan industrialisasi, sektor tersier di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Menurut Martin Andersson dan Christer Gunnarsson (2003), sektor jasa mengalami pertumbuhan yang amat pesat di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ini ditandai dengan pergeseran ekonomi dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier.

Hill dalam *Economic Development in Southeast Asia* menegaskan bahwa perkembangan sektor tersier di Indonesia didorong oleh urbanisasi dan industrialisasi yang pesat. Dengan semakin banyaknya populasi yang tinggal di kota, sektor jasa mengalami lonjakan permintaan. Meningkatnya kebutuhan akan layanan pendukung industri juga menjadi faktor lonjakan permintaan untuk sektor jasa. Sektor-sektor jasa tersebut mencakup layanan transportasi, logistik, dan distribusi, yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di seluruh negeri.

Sektor tersier juga berkembang seiring dengan globalisasi dan modernisasi. Andersson dan Gunnarsson (2003) menyebutkan bahwa sektor ini memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan ekonomi nasional dengan pasar global. Peran yang besar terlihat dapat dilihat melalui perdagangan internasional, pariwisata, dan jasa keuangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi sektor tersier, khususnya dalam hal ekspansi layanan berbasis digital yang semakin populer.

Menurut M. D. Patria dalam *Struktur Ekonomi Indonesia*, sektor tersier berperan penting dalam mempercepat diversifikasi ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi. Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pertumbuhan sektor jasa di bidang perbankan, asuransi, serta jasa telekomunikasi telah memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Sektor-sektor ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, Hill (1996) menggarisbawahi bahwa sektor tersier juga berpotensi dalam menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan akses terhadap layanan jasa antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak layanan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan sering kali kekurangan infrastruktur dasar, seperti transportasi dan telekomunikasi, yang menghambat pengembangan sektor jasa di wilayah tersebut.

Sektor pariwisata merupakan salah satu subsektor tersier yang paling menonjol di Indonesia. Andersson dan Gunnarsson (2003) menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan keanekaragaman budaya dan alam yang unik. Namun untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan investasi besar dalam infrastruktur, promosi, serta peningkatan kualitas layanan. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di masa depan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan devisa negara.

Patria (2007) juga menyoroti bahwa penting bagi sektor keuangan nasional untuk mendorong perkembangan sektor tersier di Indonesia. Jasa perbankan dan keuangan yang kuat dapat mendukung pertumbuhan bisnis, mendorong investasi, serta menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk layanan keuangan. Stabilitas sektor ini menjadi krusial dalam menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi, sektor jasa di Indonesia juga menghadapi transformasi besar. Munculnya layanan berbasis teknologi, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan layanan digital lainnya membuka peluang baru dalam sektor tersier. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan, tetapi juga memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperkuat infrastruktur teknologi.

Secara keseluruhan, sektor tersier telah berkembang menjadi komponen vital dalam struktur ekonomi Indonesia. Dengan tantangan dan peluang yang ada, pengembangan sektor jasa akan sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Investasi dalam infrastruktur, peningkatan akses layanan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi akan menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan kontribusi sektor tersier terhadap perekonomian Indonesia.

### **C. KEBIJAKAN EKONOMI DARI MASA KE MASA**

Seiring dengan perkembangan masa pemerintahan di Indonesia, terdapat berbagai perubahan yang terjadi pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Perubahan kebijakan juga dialami pada sektor perekonomian. Kebijakan-kebijakan ekonomi terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan peradaban masa pemerintahan.

Salah satu contoh signifikan dari perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada masa transisi dari era kolonial menuju era kemerdekaan. Pada masa kolonial, kebijakan ekonomi lebih mengutamakan kepentingan penjajah dengan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk keuntungan negara kolonial. Namun, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Perubahan ini semakin terlihat pada era Orde Lama. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan

ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi terpimpin, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada pihak asing dan membangun kemandirian ekonomi. Kebijakan ini terus berevolusi hingga menuju era reformasi dan pasca reformasi, seiring dengan perkembangan global. Berbagai sektor seperti industri, pertanian, hingga perdagangan internasional turut mengalami perkembangan.

Terdapat tiga periode kebijakan ekonomi yang akan dibahas. Tiga periode tersebut terdiri dari kebijakan ekonomi masa kolonial hingga orde lama, kebijakan ekonomi orde baru, dan kebijakan ekonomi di era reformasi.

Pada masa kolonial hingga orde lama, kebijakan ekonomi Indonesia didominasi oleh pengaruh penjajahan Belanda yang membawa serta sistem ekonomi kolonial yang sangat menekankan pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini dirancang untuk memenuhi kepentingan ekonomi penjajah, dengan sedikit perhatian terhadap kesejahteraan penduduk pribumi. Perekonomian pada masa ini lebih banyak berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan kolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merancang kebijakan ekonomi yang dapat mendukung pembangunan nasional sambil mengatasi warisan dari sistem ekonomi kolonial.

Masuk ke periode orde baru, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam kebijakan ekonominya. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah fokus pada stabilitas ekonomi makro

dan pengembangan infrastruktur sebagai prioritas utama. Kebijakan ekonomi orde baru ditandai dengan liberalisasi ekonomi, peningkatan investasi asing, dan promosi sektor industri. Walaupun periode ini menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang pesat, terdapat juga kritik terhadap ketergantungan pada utang luar negeri dan ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan. Pendekatan ini mendorong modernisasi ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan terkait dengan masalah sosial dan politik.

Era reformasi membawa perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi Asia 1997-1998 dan tuntutan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah reformasi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Reformasi struktural ini mencakup desentralisasi kekuasaan ekonomi kepada pemerintah daerah, reformasi sektor perbankan, dan penegakan hukum yang lebih baik untuk mengatasi korupsi. Fokus utama pada era ini adalah menciptakan fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selama periode reformasi, kebijakan ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan global yang mempengaruhi arah dan strategi pembangunan nasional. Krisis global, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan dalam dinamika politik internasional menjadi faktor penting yang mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik. Dengan fokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis dan adaptasi terhadap perubahan global, Indonesia berusaha untuk memperkuat daya saing

dan keberlanjutan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Periode ini juga menyaksikan kemajuan dalam hal peraturan lingkungan dan kesejahteraan sosial yang diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi nasional.

Ketiga periode ekonomi Indonesia memiliki keunikannya masing-masing. Setiap masa memiliki pandangan dan fokus yang berbeda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Terdapat berbagai metode yang diterapkan oleh setiap presiden dan jajaran pemerintahannya dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta dapat bersaing dalam ekonomi internasional. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga periode ekonomi tersebut.

### **Kebijakan Ekonomi Masa Kolonial hingga Orde Lama**

Perkembangan ekonomi Indonesia dapat dikatakan berawal pada masa kolonial. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa kolonial, berbagai daerah di Indonesia menggunakan sistem perekonomian yang bersifat tradisional. Salah satu contoh sederhana yang dilakukan masyarakat pada masa tersebut adalah dengan melakukan barter. Barter adalah sistem pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi. Dalam sistem ini, dua pihak yang memiliki kebutuhan saling menukar barang atau jasa yang mereka miliki, dengan syarat kedua belah pihak merasa mendapatkan nilai yang seimbang dari pertukaran tersebut.

Sebelum masa kolonial, sistem barter merupakan praktik umum dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pada masa tersebut, masyarakat Indonesia hidup dalam kelompok-kelompok yang

mengandalkan pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal sebagai sumber mata pencaharian. Masyarakat saling bertukar hasil bumi atau barang-barang buatan tangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena belum ada sistem moneter yang terorganisir, masyarakat menggunakan barang-barang yang memiliki nilai fungsional dan langsung dibutuhkan seperti makanan, hasil kerajinan, atau alat-alat sederhana.

Sistem barter juga mencerminkan ekonomi berbasis komunitas yang bersifat lokal dan tradisional. Perdagangan dilakukan secara langsung antar individu atau kelompok. Masyarakat cenderung melakukan barter di pasar-pasar tradisional atau dalam interaksi antarkelompok. Sistem ini berjalan baik selama permintaan dan penawaran dapat diseimbangkan melalui kesepakatan langsung. Namun, seiring perkembangan zaman dan masuknya pengaruh kolonial, sistem ini mulai digantikan dengan penggunaan mata uang yang lebih efisien untuk perdagangan dalam skala yang lebih besar

Kebijakan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa kolonial hingga Orde Lama. Pada masa kolonial, kebijakan ekonomi didominasi oleh masa penjajahan Belanda melalui sistem ekonomi yang bertujuan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia demi keuntungan pihak kolonial. Salah satu kebijakan ekonomi paling terkenal adalah *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa yang diperkenalkan pada awal abad ke-19. Kebijakan ini mewajibkan petani di Jawa untuk menanam komoditas ekspor, seperti kopi dan gula, yang kemudian dijual dengan harga murah di pasar internasional.

Meskipun Belanda meraup keuntungan besar, rakyat Indonesia mengalami kemiskinan dan penderitaan yang parah akibat eksploitasi yang tidak berimbang dengan upah yang diberikan (Basri, 2017).

Meskipun demikian, seiring dengan tekanan internasional dan perlawanan lokal pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai memperkenalkan reformasi ekonomi. Kebijakan *Ethical Policy* atau Politik Etis di awal abad ke-20 bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi dengan memberikan perhatian lebih pada pendidikan dan irigasi. Namun, reformasi ini tidak berjalan maksimal karena lebih menguntungkan kalangan elit lokal dan perusahaan asing daripada rakyat jelata. Menurut Nasution pada *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*, reformasi tersebut menjadi awal kesadaran nasional tentang ketidakadilan dalam sistem ekonomi kolonial dan mendorong gerakan-gerakan kebangsaan untuk memperjuangkan kemerdekaan ekonomi.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi yang independen. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dihadapkan pada masalah inflasi tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada ekonomi warisan kolonial. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Soekarno berfokus pada pembangunan nasionalisme ekonomi. Pemerintah mulai mengambil alih aset-aset milik Belanda dan mendirikan perusahaan-perusahaan negara pada masa ini. Namun, ketidakstabilan politik dan

perang kemerdekaan yang berkepanjangan menghambat perkembangan ekonomi Indonesia di tahun-tahun awal kemerdekaan (Raharjo, 2018).

Indonesia kemudian mencoba menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terencana melalui program pembangunan nasional. Pemerintah meluncurkan Rencana Lima Tahun (Repelita) sebagai upaya untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat. Namun, program-program ini sering terhambat oleh kurangnya sumber daya dan kapasitas administratif. Selain itu, terjadi ketegangan dengan negara-negara barat akibat nasionalisasi perusahaan asing, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Basri (2017) menyebutkan bahwa keadaan ini berdampak pada isolasi ekonomi Indonesia dari pasar internasional.

Puncak dari kebijakan ekonomi Presiden Soekarno terlihat pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada masa ini, kebijakan ekonomi semakin dipusatkan dalam kontrol negara. Nasution (2016) menyebutkan bahwa Presiden Soekarno memperkenalkan konsep *Guided Economy* atau Ekonomi Terpimpin, yang berfokus pada kontrol negara atas sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, dan perbankan. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan kemandirian ekonomi Indonesia dari pengaruh asing, terutama dari blok negara-negara barat. Namun, kebijakan ini tidak berhasil secara efektif karena lemahnya manajemen ekonomi, korupsi, dan kurangnya investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

Selain itu, era Orde Lama juga ditandai dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek ambisius seperti pembangunan monumen dan infrastruktur besar-besaran. Hal ini memperburuk defisit anggaran dan memicu hiperinflasi. Dampak dari inflasi yang masif ini sangat buruk dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta meningkatnya ketegangan politik dan militer semakin melemahkan ekonomi nasional (Hill & Negara, 2019).

Salah satu aspek penting dari kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama adalah upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan ekonomi melalui nasionalisasi aset-aset asing. Raharjo pada *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi* menyebutkan bahwa konsolidasi kekuasaan ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara blok barat. Namun, kurangnya investasi dan keahlian dalam mengelola perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi justru membuat produktivitas menurun. Hal ini berkontribusi pada krisis ekonomi yang lebih dalam.

Peran militer dalam ekonomi juga semakin meningkat pada masa pemerintahan Orde Lama. Militer mulai mengambil kendali atas berbagai sektor ekonomi strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional. Basri (2017) menyebutkan bahwa keterlibatan militer dalam ekonomi pada masa ini sering diiringi dengan korupsi dan inefisiensi, yang semakin memperburuk kinerja ekonomi Indonesia.

Kebijakan ekonomi dari masa kolonial hingga Orde Lama penuh dengan dinamika dan tantangan. Dari eksploitasi ekonomi kolonial hingga upaya nasionalisasi dan pembangunan ekonomi terpusat, pemerintah Indonesia berjuang untuk membangun ekonomi yang mandiri dan sejahtera. Namun, banyak faktor internal dan eksternal yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Namun pada akhirnya, hal membawa Indonesia ke dalam krisis ekonomi yang parah menjelang akhir Orde Lama (Hill & Negara, 2019).

### **Kebijakan Ekonomi Orde Baru**

Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru menandai perubahan drastis dari pendekatan ekonomi sebelumnya di Indonesia. Setelah kegagalan ekonomi pada akhir Orde Lama, pemerintahan Presiden Soeharto mengambil langkah-langkah yang lebih terstruktur untuk menstabilkan ekonomi. Pada awal pemerintahannya, Orde Baru fokus pada kebijakan stabilisasi ekonomi melalui program-program yang didukung oleh lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Stabilitas makroekonomi dijadikan sebagai fondasi prioritas, terutama dalam mengendalikan inflasi, memperbaiki neraca pembayaran, dan mengelola utang luar negeri (Basri, 2017).

Salah satu kebijakan ekonomi utama pada masa Orde Baru adalah liberalisasi perdagangan dan investasi. Nasution (2016) pada *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action* menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuka perekonomian bagi investasi asing untuk mempercepat pembangunan industri. Langkah ini terlihat melalui kebijakan-kebijakan yang

mendorong sektor manufaktur dan pertambangan untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Sektor minyak dan gas yang merupakan sumber utama devisa negara juga memainkan peran penting dalam menopang ekonomi nasional selama dekade 1970-an dan 1980-an, terutama ketika harga minyak dunia sedang tinggi.

Di sisi lain, pemerintah Orde Baru memperkuat peran negara dalam pengelolaan ekonomi melalui pendekatan pembangunan yang terencana. Hill dan Negara (2019) pada *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond* menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Soeharto memperkenalkan berbagai program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Salah satunya yang paling dikenal adalah Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Melalui Pelita, pemerintah menetapkan target-target ekonomi yang ambisius, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pangan, dan pengentasan kemiskinan. Program ini mengalami kemajuan dengan adanya kemajuan pembangunan pertanian melalui program intensifikasi berhasil menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun 1984.

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru tidak lepas dari kelemahan. Raharjo (2018) menyebutkan pada *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi* bahwa ketergantungan Indonesia pada sektor minyak dan gas membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak jatuh pada 1980-an, pemerintah mengalami kesulitan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Untuk mengatasi masalah

ini, pemerintah berusaha melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong ekspor nonmigas dan mempromosikan sektor manufaktur.

Basri (2017) juga mencatat bahwa Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada dekade 1990-an. Peningkatan investasi asing dan pertumbuhan sektor swasta membuat ekonomi Indonesia tumbuh di atas rata-rata regional. Namun, periode ini juga ditandai oleh meningkatnya ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok elit tertentu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi isu besar yang merusak tata kelola ekonomi, dengan sebagian besar sumber daya dikuasai oleh segelintir konglomerat yang dekat dengan pemerintahan.

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998 menjadi pukulan telak bagi perekonomian Indonesia di akhir masa Orde Baru. Kebijakan liberalisasi finansial yang dilakukan tanpa pengawasan ketat mengakibatkan sektor keuangan Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Ketika mata uang rupiah mengalami devaluasi besar-besaran, banyak perusahaan dan bank yang mengalami kebangkrutan karena beban utang dalam mata uang asing yang melonjak drastis. Krisis ini memperparah kondisi ekonomi dan politik Indonesia, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 (Nasution, 2016).

Hill dan Negara (2019) menggarisbawahi bahwa masa Orde Baru berhasil mencatat sejumlah prestasi dalam pembangunan ekonomi

selama masa pemerintahan tiga dekade. Prestasi ini diantaranya adalah keberhasilan pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan ekonomi yang terlalu terpusat pada pemerintahan dan ketergantungan pada kelompok elit akhirnya memperlemah fondasi ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah untuk menangani krisis ekonomi pada akhir 1990-an menjadi bukti dari rapuhnya sistem ekonomi yang dibangun.

Selain itu, peran negara dalam ekonomi pada masa Orde Baru juga menimbulkan masalah efisiensi. Banyak perusahaan negara yang dikelola secara tidak efisien karena adanya campur tangan politik dan korupsi. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas di berbagai sektor, terutama di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Reformasi ekonomi yang lebih mendalam menjadi kebutuhan mendesak. Namun hal tersebut tidak terwujud hingga runtuhnya Orde Baru (Raharjo, 2018).

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Orde Baru memberikan dampak signifikan dalam membangun fondasi ekonomi modern Indonesia. Meskipun banyak pencapaian yang diraih, kebijakan yang tidak seimbang dan praktik-praktik korupsi menyebabkan kelemahan yang berujung pada krisis ekonomi yang menghancurkan di akhir masa pemerintahan. Pembelajaran dari era ini menjadi dasar penting bagi reformasi ekonomi di masa pasca-Orde Baru (Basri, 2017).

### **Kebijakan Ekonomi di Era Reformasi**

Era Reformasi menandai awal baru bagi kebijakan ekonomi Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Salah satu prioritas

utama di awal reformasi adalah stabilisasi ekonomi yang terganggu akibat krisis finansial Asia. Dalam tulisan *Navigating the Indonesian Economy: A Comprehensive Approach to Economic Policy*, Basri menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan darurat untuk memulihkan ekonomi. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan IMF dan restrukturisasi perbankan nasional yang runtuh. Kebijakan ini berfokus pada menstabilkan nilai tukar rupiah, mengurangi inflasi, dan memperbaiki kepercayaan investor internasional.

Pada masa ini, reformasi institusional juga mulai dilakukan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi yang rusak. Sistem perbankan yang hancur selama krisis diperbaiki melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi. Pemerintah mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertujuan menyetujui bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Selain itu, privatisasi sejumlah perusahaan negara dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi beban fiskal negara (Nasution, 2016).

Hill dan Negara (2019) melalui *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond* juga menambahkan bahwa reformasi juga dilakukan pada sektor fiskal secara prioritas. Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan pendapatan. Tujuan desentralisasi ini adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah

yang tertinggal. Kebijakan ini secara fundamental mengubah struktur anggaran negara, dengan alokasi dana yang lebih merata di seluruh provinsi.

Namun, reformasi ekonomi di era ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah besar adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan akibat krisis. Raharjo (2018) pada *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi* menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi yang lambat membuat pemerintah harus memperkuat sektor informal sebagai penyerap tenaga kerja sementara mempercepat investasi di sektor formal. Program-program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program pengentasan kemiskinan lainnya, diluncurkan untuk membantu masyarakat yang paling terdampak.

Basri (2017) turut menggarisbawahi bahwa investasi asing kembali menjadi motor penggerak penting dalam kebijakan ekonomi. Setelah krisis, pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan memperbaiki regulasi dan memberikan insentif fiskal. Namun, meskipun ada peningkatan investasi, hambatan birokrasi dan korupsi masih menjadi masalah utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Kebijakan perdagangan juga mengalami perubahan signifikan. Nasution (2016) mengemukakan bahwa Indonesia mulai membuka diri pada pasar global dengan menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat daya saing industri nasional. Namun,

keterbukaan ekonomi juga menghadapkan Indonesia pada tantangan persaingan global yang semakin ketat, terutama dalam hal produk manufaktur dan pertanian.

Memasuki era 2000-an, pemerintah mulai berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi-investasi dalam pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik dianggap krusial untuk mendukung industrialisasi dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Program pembangunan infrastruktur ini mendapat perhatian besar di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga mendorong kerja sama publik-swasta untuk mempercepat realisasi proyek (Hill & Negara, 2019).

Kebijakan ekonomi pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berfokus pada pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Hill dan Negara (2019), prioritas utama Jokowi adalah memperbaiki konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mendukung proses industrialisasi di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya kurang berkembang.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi juga menginisiasi reformasi deregulasi ekonomi guna mengurangi hambatan birokrasi yang menghalangi investasi. Paket kebijakan

ekonomi diluncurkan dengan tujuan menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki iklim bisnis. Dengan kebijakan ini, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang investasi, baik domestik maupun asing, yang diperlukan untuk memperluas lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional (Hill & Negara, 2019).

Upaya lain yang dilakukan oleh Jokowi adalah memperkuat sektor manufaktur dan memperluas basis ekonomi. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendorong ekspor produk bernilai tambah serta mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Hill dan Negara (2019) menyoroti bahwa meskipun langkah-langkah diversifikasi ekonomi telah diambil, tantangan besar masih ada, terutama terkait peningkatan daya saing industri nasional di pasar global.

Pemerintahan Jokowi juga menaruh perhatian pada pengurangan ketimpangan ekonomi dengan meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Hill dan Negara (2019) mencatat bahwa upaya redistribusi ini merupakan bagian integral dari agenda reformasi Jokowi, meskipun masih terdapat tantangan struktural seperti ketimpangan antarwilayah dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya.

Meskipun kebijakan ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dipuji atas pencapaiannya dalam pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu

dicermati. Hill dan Negara (2019) mencatat bahwa ketergantungan yang tinggi pada utang luar negeri untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur merupakan salah satu kelemahan utama. Meski pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, peningkatan utang publik berpotensi menambah beban fiskal yang berat di masa depan. Hal ini juga akan berdampak lebih buruk jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas ekonomi dan pendapatan negara.

Selain masalah utang, reformasi deregulasi yang dilaksanakan Jokowi juga menghadapi tantangan serius, seperti korupsi dan inefisiensi birokrasi. Meskipun kebijakan deregulasi berhasil mengurangi beberapa hambatan birokrasi, pelaksanaan yang tidak konsisten sering menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor. Hambatan birokrasi ini menghambat realisasi proyek-proyek investasi, khususnya di sektor yang memerlukan perizinan kompleks (Hill & Negara, 2019).

Pembangunan infrastruktur yang masif juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Proyek-proyek seperti jalan tol dan pelabuhan sering kali mengorbankan masyarakat lokal, dengan banyak kasus penggusuran lahan tanpa kompensasi memadai. Ketimpangan akses terhadap manfaat infrastruktur juga mencolok, di mana proyek besar cenderung terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah di luar Jawa sering tertinggal.

Program redistribusi dan bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah Jokowi juga terlihat pada diciptakannya Kartu Indonesia Sehat dan

Kartu Indonesia Pintar. Meskipun program-program tersebut bermanfaat bagi masyarakat miskin, program-program tersebut masih belum mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang mendalam. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tantangan besar. Hill dan Negara (2019) juga menyoroti bahwa tanpa perbaikan dalam kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, kesenjangan ini sulit diatasi meskipun berbagai program sosial telah diterapkan.

Dalam hal perdagangan dan industri, upaya untuk memperkuat sektor manufaktur dan mendorong industrialisasi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sektor industri di Indonesia masih kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam hal produktivitas dan daya saing global. Hill dan Negara (2019) menilai bahwa meskipun ada upaya hilirisasi industri, proses tersebut masih lambat dan belum menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Selain itu, tantangan dalam sektor investasi seperti ketidakpastian hukum dan perubahan kebijakan mendadak, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja dan ketergantungan pada pendapatan komoditas, juga merupakan masalah yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Kebijakan ekonomi juga menghadapi tantangan dari fluktuasi harga komoditas global selama era reformasi. Raharjo (2018) pada *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi* pada menyebutkan adanya ketergantungan Indonesia pada

ekspor sumber daya alam membuat ekonomi rentan terhadap penurunan harga minyak, batu bara, dan kelapa sawit di pasar internasional. Untuk mengurangi risiko ini, pemerintah berupaya mendorong diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor manufaktur dan jasa, meskipun upaya ini tidak selalu berjalan mulus.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi di Era Reformasi menunjukkan transformasi besar dari sistem ekonomi yang tertutup dan terpusat menuju ekonomi yang lebih terbuka dan desentralistik. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, termasuk korupsi dan ketimpangan, reformasi ekonomi telah berhasil membawa stabilitas makroekonomi yang lebih baik dan menciptakan fondasi bagi pertumbuhan yang lebih inklusif di masa mendatang.

Sejak masa kolonial hingga era Reformasi, kebijakan ekonomi Indonesia mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan transformasi politik dan sosial yang terjadi di negara ini. Pada masa kolonial, kebijakan ekonomi Belanda fokus pada eksploitasi sumber daya alam dan penguasaan pasar lokal. Kebijakan ini dirancang untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara penjajah melalui sistem tanam paksa dan monopoli perdagangan. Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan Belanda, sementara struktur ekonomi lokal dirancang untuk mendukung kepentingan kolonial, sering kali mengorbankan kesejahteraan masyarakat pribumi.

Setelah kemerdekaan, periode awal Republik Indonesia diwarnai oleh kebijakan ekonomi yang terpusat pada pembangunan dan pemulihan pasca-kemerdekaan. Di bawah pemerintahan Sukarno, kebijakan

ekonomi berfokus pada nasionalisasi perusahaan asing dan penciptaan industri nasional. Meskipun ada upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara asing, periode ini juga ditandai oleh ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta konflik internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, membawa perubahan besar dalam kebijakan ekonomi dengan pendekatan pembangunan yang lebih terencana dan pro-pasar. Kebijakan Orde Baru berfokus pada industrialisasi, investasi asing, dan stabilisasi makroekonomi. Pemerintah menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, meningkatkan infrastruktur, dan memperbaiki iklim investasi. Namun, meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebijakan ini juga menyebabkan ketimpangan sosial, korupsi, dan ketergantungan pada utang luar negeri.

Krisis finansial Asia yang melanda pada akhir 1990-an menandai berakhirnya Orde Baru dan memulai Era Reformasi. Pemerintah reformasi fokus pada stabilisasi ekonomi dan reformasi institusi untuk memperbaiki tata kelola dan mengurangi dampak krisis. Kebijakan desentralisasi fiskal diperkenalkan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, sementara reformasi perbankan dilakukan untuk menyetatkan sektor keuangan. Program-program bantuan sosial juga diluncurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis.

Selama Era Reformasi, kebijakan ekonomi mengalami transisi dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi dan pembukaan pasar global. Pemerintah berusaha memperbaiki tata kelola ekonomi dengan deregulasi dan privatisasi perusahaan negara. Meskipun ada kemajuan dalam stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tantangan seperti ketimpangan sosial dan hambatan birokrasi masih tetap ada, yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada era masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dimulai pada tahun 2014 membawa fokus baru pada pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung industrialisasi. Kebijakan deregulasi dan reformasi struktural terus diperkuat untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada utang luar negeri, masalah birokrasi, dan ketimpangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Secara keseluruhan, perjalanan kebijakan ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga Reformasi mencerminkan evolusi strategi pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial negara. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam berbagai aspek ekonomi, tantangan struktural dan kesenjangan sosial tetap menjadi isu utama yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Di samping itu, reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan dalam setiap periode memiliki dampak jangka panjang yang membentuk peta ekonomi Indonesia saat ini. Perubahan yang dilakukan pada masa

orde baru dan reformasi memberikan fondasi untuk reformasi lebih lanjut di era modern, meskipun implementasi kebijakan sering kali menghadapi hambatan. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada periode orde baru, misalnya, masih memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi tantangan terkait dengan pemerataan hasil pembangunan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada era reformasi, meskipun terdapat kemajuan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, tantangan baru muncul dalam bentuk kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan global yang cepat. Indonesia harus terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi internasional, seperti perubahan dalam perdagangan global dan fluktuasi pasar, sambil tetap menjaga kestabilan ekonomi domestik. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan memerlukan koordinasi yang erat antara kebijakan ekonomi, strategi pembangunan, dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Akhirnya, penting bagi Indonesia untuk terus menerapkan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan perkembangan global dan kebutuhan domestik. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ekonomi dan penerapan strategi yang responsif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa negara ini tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, Indonesia dapat melangkah lebih jauh

dalam perjalanan ekonominya menuju masa depan yang lebih stabil dan makmur.

# BAB 3

## SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI INDONESIA

### A. SEKTOR PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencaharian. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan industrialisasi, status Indonesia sebagai negara agraris mulai bergeser. Saat ini, meskipun sektor pertanian masih berperan penting, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah menurun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. PDB Sektor Pertanian Tahun 1980 - 2022 dan  
Kontribusinya Berdasarkan Harga Berlaku

Tahun	PDB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah)	PDB (Miliar Rupiah)	Kontribusi (Persen)
1980	11.290,3	45.445,7	24,84
1990	42.148,7	196.919,2	21,40
2000	218.300	1.282.000	17,02
2010	985.400	6.436.300	15,31
2020	2.115.500	15.443.400	13,70
2022	2.428.900	19.588.445	12,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 1982-2024

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB kita semakin menurun dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1980, kontribusi sektor pertanian sebesar 24,84 persen, pada tahun 1990 sudah mulai menurun. Pada tahun 2000, kontribusi sektor pertanian sudah dibawah 20 persen, hingga pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB hanya 12,40 persen.

Dari sisi tenaga kerja, sektor pertanian masih mempekerjakan sebagian besar penduduk, terutama di daerah pedesaan. Jadi, Indonesia masih bisa disebut sebagai negara agraris dari perspektif struktur tenaga kerja, meskipun secara ekonomi lebih condong menjadi negara dengan basis sektor industri dan jasa. Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Indonesia yang Bekerja di Sektor Pertanian dan Jumlah Penduduk Indonesia yang Bekerja Tahun 1980-2022

Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian (Orang)	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian (Persen)
1980	31.545.399	51.780.359	60,92
1990	41.205.791	76.423.179	53,92
2000	40.676.713	89.837.730	45,28
2010	41.611.840	104.870.663	39,68
2020	34.577.831	126.515.119	27,33
2022	37.130.676	131.050.523	28,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 1982-2024

Data di Tabel 3.2 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih relatif banyak, sekalipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 1980 persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian bahkan hampir mencapai 61 persen dan masih di atas 53 persen pada tahun 1990. Memasuki tahun 2020, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian berada di bawah 30 persen.

Penyebab berkurangnya minat tenaga kerja muda untuk bekerja di sektor pertanian menurut Susilowati (2016) disebabkan antara lain oleh anggapan bekerja di sektor pertanian tidak bergengsi, pertanian memiliki risiko tinggi, pekerjaan menjadi petani tidak memberikan jaminan stabilitas dan kontinuitas pendapatan, rata-rata kepemilikan lahan sempit, serta belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda. Dari data di Tabel 3.2 dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami transformasi ekonomi dan tidak lagi secara eksklusif bergantung pada sektor agraris, tetapi peran pertanian tetap signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama di perdesaan.

Sektor strategis menurut Arman *et al.* (2016) merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor lain serta mampu menghasilkan output pada skala yang besar. Sektor strategis akan menciptakan siklus ekonomi secara kontinu hingga sektor tersebut bermetamorfosa menjadi sektor unggulan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sektor unggulan Indonesia adalah pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya (Bappenas RI, 2024).

Korelasi antara sektor pertanian dan ketahanan pangan merupakan hubungan yang mencakup berbagai dimensi, termasuk produktivitas pertanian, inovasi teknologi, perubahan iklim, dan faktor sosio-ekonomi. Keanekaragaman hayati pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan kecukupan pangan dan ketahanan terhadap guncangan lingkungan. menyoroti bahwa menjaga keanekaragaman hayati pertanian sangat penting untuk ketahanan pangan, terutama di daerah pedesaan di mana tanaman yang beragam dapat memberikan makanan yang lebih seimbang dan mengurangi risiko yang terkait dengan praktik pertanian monokultur (Kaibi *et al.*, 2015). Temuan ini didukung oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yang menekankan bahwa sistem pertanian yang beragam dapat lebih tahan terhadap variabilitas iklim dan peristiwa cuaca ekstrem, sehingga berkontribusi pada pasokan pangan yang lebih stabil.

Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian merupakan faktor penting lain yang memengaruhi ketahanan pangan. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan berdampak buruk pada hasil panen Hal ini menekankan pentingnya pertanian dalam meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan, terutama di wilayah yang didominasi oleh pertanian tadah hujan (Article and Assan, 2022). Ketergantungan pada praktik pertanian yang peka terhadap iklim ini mengharuskan adopsi teknologi pertanian inovatif yang dapat meningkatkan ketahanan dan produktivitas Integrasi teknologi tersebut dapat meningkatkan proses produksi pangan, yang pada akhirnya

mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang selaras dengan tujuan ketahanan pangan (Li *et al.*, 2021).

Beberapa investasi dapat meningkatkan produktivitas dan infrastruktur, investasi lainnya dapat menyebabkan hasil negatif seperti perampasan lahan dan pengusuran masyarakat lokal (Odit, 2023). Dualitas ini menggarisbawahi perlunya strategi investasi yang dirancang dengan cermat yang memprioritaskan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat yang rentan. Lebih lanjut, penelitian mengilustrasikan hal ini dengan menunjukkan bahwa akses kredit pertanian secara signifikan memengaruhi produksi pangan dan ketahanan pangan (Osabohien, Afolabi and Godwin, 2018). Dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan, petani dapat berinvestasi pada input dan teknologi yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian mereka dan meningkatkan ketahanan pangan.

Pertanian perkotaan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan dengan menyediakan produk segar dengan biaya yang lebih rendah, sehingga meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi penduduk perkotaan. Namun, hubungan antara pertanian perkotaan dan ketahanan pangan bisa jadi tidak konsisten, karena faktor-faktor seperti pendapatan rumah tangga dan kebijakan lokal dapat memengaruhi efektivitas praktik pertanian perkotaan (Crush, Frayne and Mccordic, 2017). Oleh karena itu, mendorong kebijakan yang mendukung dan keterlibatan masyarakat dalam pertanian

perkotaan sangat penting untuk memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan ketahanan pangan.

## B. SEKTOR INDUSTRI DAN MANUFAKTUR

Sektor manufaktur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja. Sektor ini dicirikan oleh beragam industri, dengan industri makanan dan minuman menjadi yang paling dominan, diikuti oleh industri kilang batu bara, minyak, dan gas, alat transportasi, barang logam, dan bahan kimia (Prastiyo, 2020). Keragaman ini mencerminkan kemampuan manufaktur Indonesia, yang telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional. Nilai dari PDB industri pengolahan Indonesia dari masa ke masa disajikan oleh Tabel 3.3.

Tabel 3.3. PDB Sektor Industri Pengolahan Tahun 1980-2022 dan Kontribusinya Berdasarkan Harga Berlaku

Tahun	PDB Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur (Miliar Rupiah)	PDB ADHB (Miliar Rupiah)	Kontribusi (Persen)
1980	5.287,9	45.445,7	11,64
1990	40.029,7	196.919,2	20,33
2000	335.300	1.282.000	26,15
2010	1.595.800	6.436.300	24,79
2020	3.068.041,70	15.443.400	19,87
2022	3.591.774,70	19.588.445	18,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 1982-2024

Dari Tabel 3.3 diketahui bahwa nilai PDB sektor industri manufaktur mengalami kenaikan dari tahun 1980 hingga tahun 2022. Jika dilihat dari kontribusinya, tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Tahun 2022 kontribusi sektor industri pengolahan juga menurun, hal ini disebabkan karena meningkatnya sektor lain seperti sektor informasi dan telekomunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Salah satu tantangan penting yang dihadapi sektor manufaktur Indonesia adalah produktivitasnya. Studi menunjukkan bahwa output di sektor ini terutama didorong oleh input material daripada tenaga kerja, modal, atau energi (Yasin, 2021). Temuan ini sejalan dengan tren yang lebih luas yang diamati di negara-negara berkembang, di mana efisiensi material sering kali lebih diutamakan daripada produktivitas tenaga kerja.

Inisiatif yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, seperti adopsi *Internet of Things* (IoT), telah diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk (Nanjar *et al.*, 2024). Integrasi teknologi digital dipandang sebagai jalan untuk tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memungkinkan produsen untuk bersaing di pasar khusus, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, transisi ini bukannya tanpa tantangan, karena perusahaan harus menavigasi masalah manajerial, sistemik, dan keamanan yang terkait dengan digitalisasi.

Korelasi antara sektor industri dan manufaktur mencerminkan hubungan saling ketergantungan yang kuat, di mana manufaktur merupakan salah satu sub-sektor utama dalam sektor industri. Berikut beberapa aspek penting dari korelasi ini:

a. Peningkatan Produktivitas

Sektor manufaktur berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan produktivitas industri melalui produksi barang dalam skala besar. Dengan inovasi dan efisiensi dalam proses manufaktur, industri dapat memproduksi barang lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah.

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor manufaktur memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Manufaktur sering kali membutuhkan tenaga kerja terampil, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam industri secara keseluruhan.

c. Kontribusi terhadap PDB

Manufaktur berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri. Peningkatan output manufaktur dapat meningkatkan nilai tambah industri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

d. Adopsi Teknologi

Sektor manufaktur sering kali menjadi pelopor dalam mengadopsi teknologi baru seperti otomatisasi, robotik, dan kecerdasan buatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses produksi, tetapi

juga mempengaruhi sektor industri lain dalam mengadopsi teknologi yang sama.

e. Pengaruh Globalisasi

Keduanya juga terhubung dalam konteks perdagangan internasional. Sektor manufaktur yang kompetitif memungkinkan industri untuk bersaing di pasar global, sementara kebijakan industri yang mendukung dapat membantu manufaktur berkembang lebih jauh.

f. Ekonomi Berkelanjutan

Dengan peningkatan kesadaran terhadap lingkungan, manufaktur yang ramah lingkungan mendorong sektor industri untuk beralih ke proses produksi yang lebih berkelanjutan, mempengaruhi rantai pasok, dan permintaan bahan baku yang lebih bersih dan efisien.

Secara keseluruhan, keberhasilan dan perkembangan sektor manufaktur sering kali menjadi indikator penting dari kesehatan sektor industri secara umum.

### **C. SEKTOR JASA DAN PARIWISATA**

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi yang signifikan, yang berkontribusi terhadap pembangunan lokal dan nasional. Indonesia terkenal dengan beragam atraksi wisata, mulai dari keajaiban alam hingga warisan budaya, yang secara kolektif menarik jutaan wisatawan domestik dan internasional setiap tahunnya. Industri pariwisata di Indonesia telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, terutama dalam menghadapi

tantangan seperti pandemi Covid-19, yang sangat berdampak pada perjalanan global.

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia disebabkan oleh destinasi wisata tradisional, tetapi juga karena munculnya desa-desa wisata yang mengintegrasikan atraksi dengan fasilitas lokal, sehingga meningkatkan pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata sangat besar, yang menyebabkan penurunan drastis pada kunjungan wisatawan dan kehilangan pekerjaan yang signifikan dalam industri ini (Dan *et al.*, 2023). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk (Orang)

Tahun	Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Menurut Pintu Masuk (Orang)
2017	14.039.799
2018	15.810.305
2019	16.106.954
2020	4.052.923
2021	1.557.530
2022	5.889.031
2023	11.677.825

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 1982-2024

Dari Tabel 3.4, dampak pandemi sangat terasa, jumlah wisatawan berkurang drastis. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan dapat

meningkat karena pemerintah dan pelaku wisata berpartisipasi melakukan pameran dan melakukan promosi dengan *tagline* "Wonderful Indonesia".

Dampak dari pariwisata bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat bisa dibagi menjadi delapan kelompok besar, diantaranya: dampak terhadap kesempatan kerja, harga-harga, penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, distribusi keuntungan, kepemilikan kontrol kontrol, pendapatan pemerintah, dan pembangunan pada umumnya (Jaelani, 2017).

Fokus dari pemerintah Indonesia pada saat ini melalui Wonderful Indonesia berfokus pada membangkitkan kembali eksistensi sektor pariwisata di kancah global. Wonderful Indonesia adalah bentuk dan komitmen yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun internasional yang mana perlunya peran pemerintah dalam membangun identitas komperatif Wonderful Indonesia.

Korelasi antara sektor jasa dan pariwisata sangat erat, karena sektor pariwisata bergantung pada berbagai layanan yang disediakan oleh sektor jasa. Beberapa aspek penting dari korelasi ini adalah:

a. Penyediaan Layanan Utama

Sektor jasa menyediakan layanan penting bagi wisatawan, seperti akomodasi (hotel, resort), transportasi (pesawat, kereta, bus), restoran, agen perjalanan, dan pemandu wisata. Tanpa sektor jasa yang kuat, industri pariwisata tidak dapat berfungsi dengan baik

karena wisatawan membutuhkan berbagai layanan ini selama perjalanan mereka.

b. Kontribusi terhadap Ekonomi

Sektor jasa, terutama dalam konteks pariwisata, menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) banyak negara. Pendapatan yang dihasilkan dari layanan pariwisata seperti transportasi, makanan, dan penginapan meningkatkan sumbangan sektor jasa ke dalam perekonomian secara keseluruhan.

c. Penciptaan Lapangan Kerja

Pariwisata mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor jasa, seperti perhotelan, restoran, transportasi, hiburan, dan pemandu wisata. Di negara-negara yang bergantung pada pariwisata, banyak pekerjaan di sektor jasa bergantung langsung pada kedatangan wisatawan.

d. Peningkatan Kualitas Layanan

Sektor jasa yang berkembang mendorong peningkatan kualitas layanan dalam industri pariwisata. Persaingan global dan meningkatnya harapan wisatawan membuat penyedia jasa harus terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan mereka, seperti layanan pelanggan, teknologi digital, dan personalisasi pengalaman wisata.

e. Pengaruh Musiman

Pariwisata sering kali bersifat musiman, yang memengaruhi sektor jasa dalam hal permintaan yang fluktuatif. Pada musim liburan atau puncak pariwisata, sektor jasa seperti hotel, transportasi, dan

restoran mengalami peningkatan permintaan. Sebaliknya, di luar musim puncak, sektor jasa harus menghadapi penurunan bisnis.

f. Digitalisasi dan Teknologi

Kemajuan teknologi dalam sektor jasa juga mempengaruhi pariwisata. Platform digital seperti aplikasi pemesanan hotel, transportasi online, serta panduan wisata virtual meningkatkan pengalaman wisatawan dan mempermudah akses terhadap layanan jasa pariwisata.

g. Ekonomi Berbasis Pengalaman

Dalam beberapa tahun terakhir, ada pergeseran ke arah ekonomi yang lebih berbasis pengalaman. Wisatawan tidak hanya mencari destinasi, tetapi juga pengalaman yang disediakan oleh sektor jasa, seperti tur budaya, kuliner, olahraga, dan rekreasi. Ini memperkuat keterkaitan antara pariwisata dan sektor jasa yang menyediakan berbagai jenis pengalaman.

h. Dampak Pariwisata Berkelanjutan

Dalam sektor pariwisata berkelanjutan, layanan jasa yang terkait dengan lingkungan, seperti eco-tourism dan green hotels, telah tumbuh. Ini meningkatkan fokus sektor jasa pada praktik ramah lingkungan yang mendukung pariwisata yang lebih bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, pariwisata dan sektor jasa berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis, di mana pertumbuhan satu sektor akan mendorong kemajuan sektor lainnya.

## D. TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEREKONOMIAN

Teknologi dan inovasi memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa dampak utama yang ditimbulkan oleh teknologi dan inovasi:

### a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Teknologi telah meningkatkan produktivitas di berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan jasa. Dengan adopsi teknologi digital, otomatisasi, dan inovasi proses, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

### b. Meningkatkan Daya Saing Global

Teknologi memungkinkan perusahaan Indonesia untuk bersaing di pasar global. Inovasi dalam produk dan layanan, serta penggunaan teknologi seperti e-commerce, big data, dan kecerdasan buatan (AI), membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas produk.

### c. Mendorong Digitalisasi dan Transformasi Industri

Adopsi teknologi seperti Internet of Things (IoT), otomatisasi industri, dan teknologi digital telah mendorong transformasi industri di Indonesia. Misalnya, industri manufaktur telah memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Transformasi ini dikenal sebagai "Industry 4.0".

d. Peningkatan Sektor Jasa Digital

Sektor jasa digital, terutama fintech, e-commerce, dan startup teknologi, telah tumbuh pesat di Indonesia. Inovasi dalam pembayaran digital, perbankan berbasis aplikasi, dan layanan keuangan telah memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki akses perbankan (\*unbanked population\*).

e. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Teknologi juga telah mengubah sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Inovasi dalam pembelajaran daring (e-learning) dan platform kesehatan digital telah memperluas akses ke layanan penting ini, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan sumber daya manusia yang lebih kompeten.

f. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Teknologi digital telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang dapat menjangkau pelanggan baru melalui platform digital. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperluas inklusi ekonomi.

g. Peningkatan Inovasi Pertanian

Inovasi teknologi juga telah berperan dalam sektor pertanian. Teknologi seperti pertanian presisi, irigasi otomatis, dan drone untuk pemantauan tanaman telah membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mengatasi tantangan lingkungan.

#### h. Pengembangan Energi Terbarukan

Inovasi di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta semakin banyak berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memenuhi target pengurangan emisi karbon.

#### i. Transformasi Pemerintahan

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui e-government. Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara daring, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

#### j. Mendorong Inovasi Sosial

Selain inovasi teknologi, Indonesia juga melihat pertumbuhan dalam inovasi sosial, di mana teknologi digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Contohnya adalah platform-platform yang memfasilitasi bantuan sosial, pendidikan anak-anak di daerah terpencil, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Secara keseluruhan, peran teknologi dan inovasi dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan akan terus menjadi pendorong utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mengatasi tantangan sosial. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan digital dan kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Allen, R. C. (2011). *Global economic history: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Andersson, M., & Gunnarsson, C. (2003). *Development and Structural Change in the Asia-Pacific: Globalising Miracles or the End of a Model?* London: Routledge.
- Arman, A. et al. (2016) 'Analisis Sektor Strategis Pulau Sulawesi, Jawa Timur dan Kalimantan Timur', *Sosiohumaniora*, 18(2), pp. 97-107.
- Article, R. and Assan, N. (2022) 'It' s time for reimagining the future of food security in sub - Saharan Africa : Gender-Smallholder Agriculture-Climate Change nexus', pp. 1-20. Available at: <https://doi.org/10.31586/ujfs.2022.504>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) 'Statistik Indonesia', Badan Pusat Statistik, 52. Available at: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>.
- Bappenas RI (2024) 'Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2020-2024', *Rancangan Teknokratik*, pp. 1-315.
- Basri, M. C. (2017). *Navigating the Indonesian Economy: A Comprehensive Approach to Economic Policy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Basri, M. C., & Hill, H. (2011). *Indonesian Growth Dynamics*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Booth, A. (1998). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Booth, A. (1998). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. Palgrave Macmillan.
- Cameron, R., & Neal, L. (2003). *A concise economic history of the world: From Paleolithic times to the present (4th ed.)*. Oxford University Press.
- Clark, G. (2007). *A farewell to alms: A brief economic history of the world*. Princeton University Press.
- Crush, J., Frayne, B. and Mccordic, C. (2017) 'Urban Agriculture and Urban Food Insecurity in Maseru , Lesotho', 5(2), pp. 33–42. Available at: <https://doi.org/10.12691/jfs-5-2-3>.
- Dan, I.U. et al. (2023) 'Confirming the Receipts of International Tourism in Indonesia after the COVID-19 Pandemic : Analyzed with Macroeconomic Indicators', 2(1), pp. 7–13. Available at: <https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i3.235>.
- Dick, H., Houben, V., Lindblad, J. T., & Thee, K. W. (2002). *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Allen & Unwin.
- Hill, H. (1996). *Economic Development in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hill, H. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge University Press.
- Hill, H., & Negara, S. D. (2019). *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Hirst, P., Thompson, G., & Bromley, S. (2015). *Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance*. Polity Press.
- Jaelani, A. (2017) 'Halal Tourism Industry in Indonesia : Potential and Prospects', 7(3), pp. 25–34.

- Kaibi, F.K.M. et al. (2015) 'Effects of agricultural biodiversity and seasonal rain on dietary adequacy and household food security in rural areas of Kenya', *BMC Public Health*, 15, pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1755-9>.
- Li, G. et al. (2021) 'A study on the relationship between income change and the water footprint of food consumption in urban China', *Sustainability (Switzerland)*, 13(13), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.3390/su13137076>.
- Nanjar, A. et al. (2024) 'Internet Of Things ( IoT ) Integration In Telecommunication Networks : Challenges and Opportunities', 3(1).
- Nasution, A. (2016). *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Oditi, J. (2023) 'Agricultural Investment and Food Security Jayden Oditi', *International Peer Review Journal and Book Publisher*, 8(3), pp. 22–32.
- O'Rourke, K. H., & Williamson, J. G. (1999). *Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy*. MIT Press.
- Osabohien, R., Afolabi, A. and Godwin, A. (2018) 'An Econometric Analysis of Food Security and Agricultural Credit Facilities in Nigeria', pp. 227–239. Available at: <https://doi.org/10.2174/1874331501812010227>.
- Osterhammel, J., & Petersson, N. P. (2005). *Globalization: A Short History*. Princeton University Press.
- Patria, M. D. (2007). *Struktur Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Prastiyo, S.E. (2020) 'How agriculture , manufacture , and urbanization induced carbon emission ? The case of Indonesia', pp. 42092–42103.

- Raharjo, A. A. (2018). *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Soesastro, H. (2004). *The Political Economy of Trade Policy in Indonesia*. CSIS Southeast Asia Papers.
- Susilowati, S.H. (2016) 'Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian', *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), pp. 35-55. Available at: <https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/bab7931f-c94e-4a18-b491-a7d65b80cf16/content#:~:text=Berbagai faktor penyebab menurunnya minat,diversifikasi usaha nonpertanian dan industri.>
- Tambunan, T. (2010). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2019). *Central Bank Policy: Theory and Practice*. Emerald Publishing.
- Yasin, M.Z. (2021) 'Technical Efficiency and Total Factor Productivity Growth of Indonesian Manufacturing Industry : Does Openness Matter ?' Available at: <https://doi.org/10.1177/23210222211024438>.

## BIOGRAFI PENULIS



### **Dr. Irma Suryahani SE, M.Si**

Penulis merupakan staff pengajar berstatus dosen aktif yang berada di Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan pendidikan terakhir yaitu Program Doktor Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Selain berprofesi sebagai dosen aktif, penulis juga memegang beberapa jabatan strategis seperti Pengelola Kelas

Internasional Program Studi Ekonomi (periode 2007-2013) dan pada periode saat ini memegang jabatan sebagai Kepala Laboratorium Pengembangan IESP FEB Unsoed yang dimulai sejak tahun 2021. Penulis memiliki ketertarikan dalam riset Ekonomi dan Lingkungan. Riset terbaru yang dilakukan oleh penulis salah satunya berjudul "Model Pengelolaan Objek Wisata Dieng Kab. Banjarnegara" yang secara ringkas membahas tentang strategi bagaimana pariwisata Dieng dapat memiliki sistem pengelolaan yang lebih efisien serta mengusung perkembangan perekonomian daerah. Pada tahun 2021 penulis melakukan pengabdian yang bertemakan "Pemberdayaan Masyarakat Pemuda dalam Pengelolaan Obyek Wisata Berkelanjutan di Desa Kotayasa".

E-mail : [irma.suryahani@unsoed.ac.id](mailto:irma.suryahani@unsoed.ac.id)



**Dr. Nurhayati, SE, ME**

Merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Trisakti dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan melanjutkan Pasca Sarjana (S3) di Program Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Pengalaman mengajar Statistika, Ekonometrika dan Praktikum Alat Analisis Kuantitatif. Banyak menulis artikel di bidang Ekonomi, Regional, dan Pembangunan Berkelanjutan. Penulis aktif sebagai pengurus Jurnal sebagai Managing Editor pada Jurnal Media Ekonomi. Penulis juga aktif sebagai Ketua Lembaga Pengolahan Data dan Statistik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.



**Dr. E. Ratna Setyawati Gunawan**

Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Penulis menyelesaikan pendidikan Serjana dan Doktoral di Unsoed, serta Magister di Universitas Gadjah Mada. Penulis telah menerbitkan satu buku monograf dengan judul Project Digital: E-Marketplace Melalui Penerapan Inovasi Teknologi dan tiga *book chapter* dengan judul (1) Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan, (2) Creativity, Innovation, Entrepreneurship, and Leadership for Sustainable Rural Development, serta (3) Pendidikan

Kewirausahaan Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi: Menggagas Peran Kewirausahaan Sebagai Pilar Ekonomi Bangsa. Selain buku, penulis juga menulis artikel yang telah terbit di jurnal Signifikan terindeks Sinta 2 serta jurnal International Journal of Human Capital in Urban Management (IJHCUM) dan jurnal Contaduria y Administracion terindeks Scopus.

**Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi  
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik  
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

**SONPEDIA.COM**  
**PT. Sonpedia Publishing Indonesia**

**Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: [sonpediapublishing@gmail.com](mailto:sonpediapublishing@gmail.com)

Website: [www.buku.sonpedia.com](http://www.buku.sonpedia.com)